ISSN 2962-4177

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD 2025 - 2029

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

INOVASI TANA HATI ACIL

LENSA PEMBANGUNAN

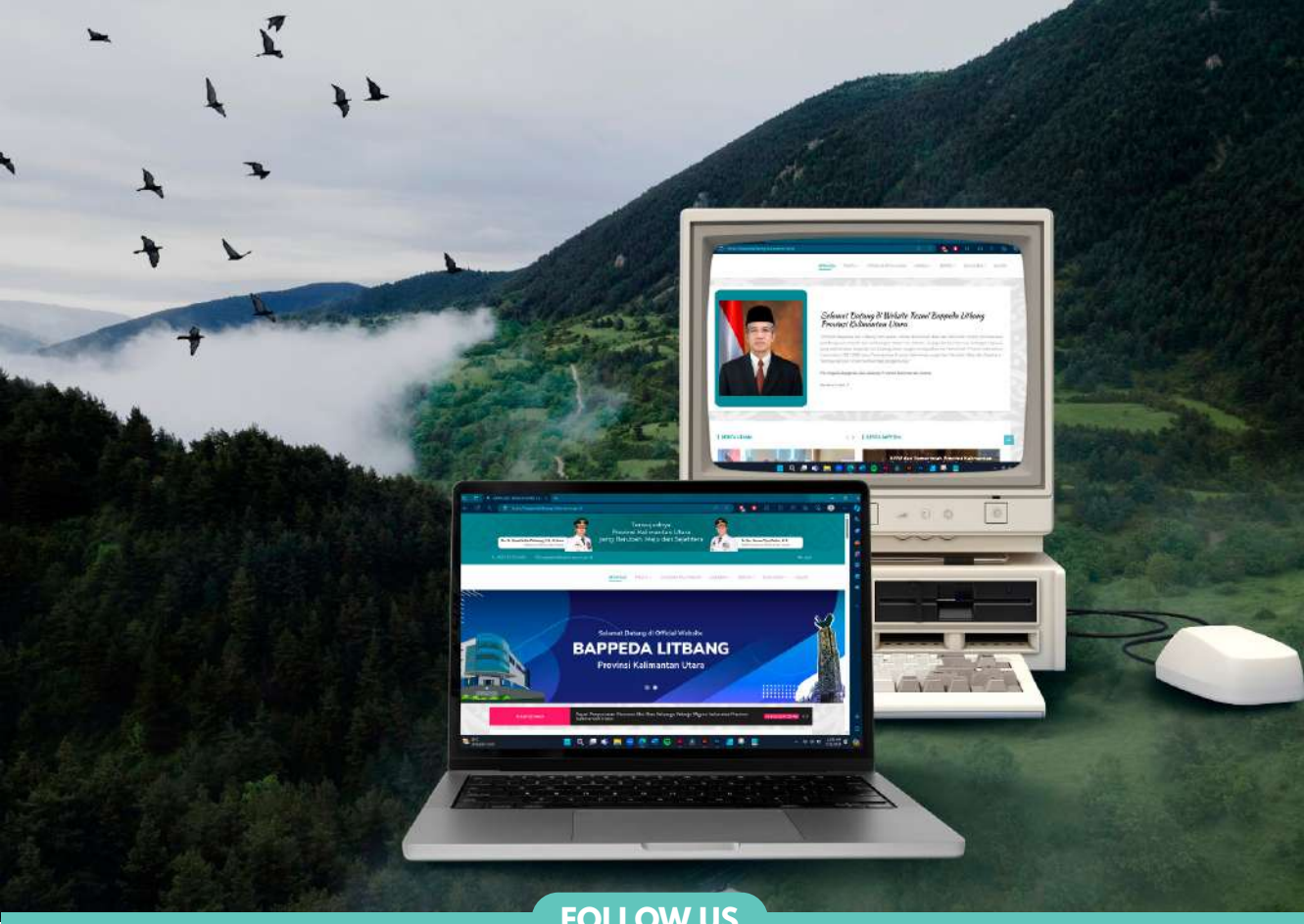
BULETIN

EDISI 3 JULI - SEPTEMBER 2024

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS PENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



ISSN 2962-4177



FOLLOW US

Official Social Media

BAPPEDA & LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA



bappedalitbang.kaltaraprov.go.id

bappedalitbang_kaltara

Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara



TAJUK

Seraya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendak-Nya, Buletin Lensa Pembangunan Edisi 16 ini bisa tersaji di hadapan Anda, para pembaca budiman. Di edisi kali ini, Buletin Lensa Pembangunan akan menghadirkan berbagai informasi menarik kepada pembaca sekalian, seputar perencanaan dan pembangunan serta inovasi daerah di Kalimantan Utara serta berbagai informasi menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Edisi kali ini Lensa Pembangunan hadir dengan topik utama Pengembangan Konektivitas Pendukung Pembangunan Berkelanjutan. Konektivitas memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama melalui peningkatan akses, efisiensi, dan inklusi sosial. Konektivitas dan infrastruktur adalah dua konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks teknologi, jaringan dan pembangunan.

Tidak ketinggalan, redaksi akan menyajikan beberapa liputan kegiatan seperti Lokakarya Pembahasan RAD Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan *Sustainable Inclusive Economics Development* (SIED) Expo, dan Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kalimantan Utara 2025 - 2029.

Jangan lewatkan pula artikel inovasi derah TANA HATI ACIL (Pendekatan Pelayanan Kesehatan di kawasan Terpencil) dan jalan-jalan ke Gunung Rego, Kabupaten Bulungan.

Akhir kata, semoga buletin ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Selamat membaca!



Mochamad Sarkawi, S.Hut.M.Eng
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LENSA PEMBANGUNAN

PENGARAH

Gubernur Kalimantan Utara
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

PENASEHAT REDAKSI

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

EDITOR

Linda Marlisa

PENULIS ARTIKEL

Mochamad Sarkawi, Retno Sawitri, Romih, Novieka Fitriani, Lisa Olivia, Ady Setiawan, Ida Ayu Parlina

DESIGN GRAFIS

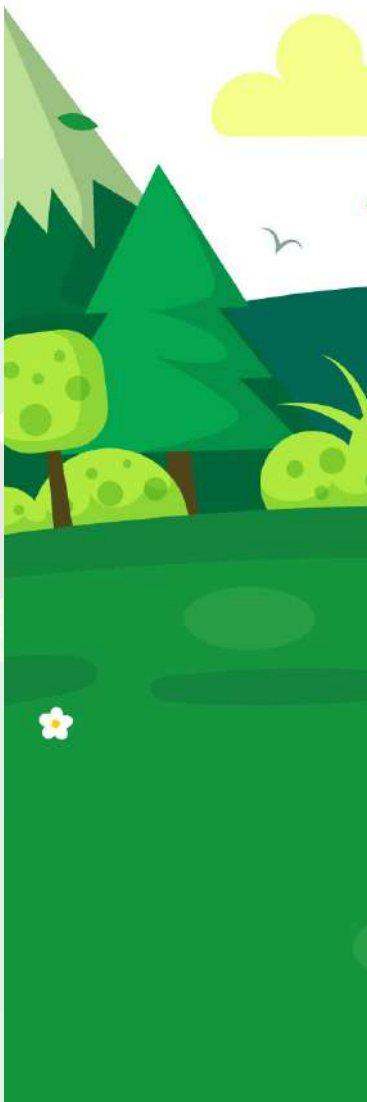
Puput Islamitha, Cristove Dismond

SEKRETARIAT

Humayati Fahriah, Dewi Erisna Utami, M. Roja Fajari

ALAMAT REDAKSI

Jl. Agathis, Gd. PUPR-PERKIM LT. 4
Tanjung Selor - Kalimantan Utara



DAFTAR ISI



06. TOPIK UTAMA
PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS PENDUKUNG PEMBANGUNAN



18. LIPUTAN KEGIATAN
LOKAKARYA PEMBAHASAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS DI KALIMANTAN UTARA



22. PERTEMUAN TIM TEKNIS & SIDANG KE 26 JKK/KK SOSEK MALINDO



30. GUBERNUR BUKA SIED EXPO TAHUN 2024



44. SEKILAS INFO



46. INOVASI DAERAH
TANA HATI ACIL (PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN TERPENCIL)



48. ADMIN SMART
APLIKASI MANAJEMEN APLIKASI PERKANTORAN



50. SI UPIK
SISTEM ELEKTRONIK PENGENDALIAN INFLASI





54. JELAJAH



56. POTRET RUANG
PEMBUATAN PABAYO





58. MUATAN LOKAL







PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS PENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konektivitas memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama melalui peningkatan akses, efisiensi, dan inklusi sosial. Konektivitas dan infrastruktur adalah dua konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks teknologi, jaringan dan pembangunan.

Konektivitas mengacu pada kemampuan perangkat, sistem, atau orang untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, baik secara fisik maupun digital. Contohnya konektivitas internet, koneksi Wi-Fi, jaringan seluler, koneksi antar komputer di jaringan lokal (LAN), atau koneksi perangkat melalui *Bluetooth.*

Fokus konektivitas lebih menekankan pada bagaimana jaringan atau sistem dapat berkomunikasi dan bertukar data, serta kualitas dan kecepatan komunikasi tersebut. Infrastruktur adalah kerangka fisik atau teknologi yang mendukung layanan, koneksi, dan komunikasi.

Dalam konteks teknologi, infrastruktur mengacu pada perangkat keras *(hardware)*, fasilitas, dan sumber daya fisik yang mendukung sistem dan jaringan.

Sebagai contoh menara BTS *(Base Transceiver Station)* untuk sinyal seluler, kabel fiber optik untuk internet, server, pusat data, *router* dan *switch*. Fokus Infrastruktur lebih berkaitan dengan sarana fisik dan teknologi yang memungkinkan konektivitas dan layanan dapat beroperasi.

Perbedaan utama, konektivitas adalah hasil dari infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan hubungan antara berbagai perangkat atau sistem. Infrastruktur adalah dasar fisik atau teknologi yang dibangun untuk mendukung konektivitas tersebut.

Singkatnya, konektivitas adalah apa yang kita rasakan atau gunakan (misalnya, kemampuan untuk mengakses internet atau menelepon), sedangkan infrastruktur adalah apa yang memungkinkan itu semua terjadi (seperti jaringan kabel, menara seluler, dan pusat data).

Pengembangan Infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang



dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



Highlight Sasaran Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2020-2025.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pembangunan Infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan dan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk transformasi digital. Berikut strategi dan *highlight* sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2025.



Jejaring Infrastruktur Transportasi Provinsi Kalimantan Utara

Pengembangan Konektivitas Pendukung Perekonomian di Kalimantan Utara

Penguatan konektivitas antar wilayah merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan 7 agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024 dan 10 Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kaltara 2021 – 2026. Terwujudnya konektivitas akan mendukung terciptanya kemakmuran bagi seluruh wilayah, khususnya terpencil dan terluar.

Peletakan dasar konektivitas untuk mendukung terciptanya kemakmuran di Kaltara ada dalam pengembangan jejaring transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan/pusat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan jejaring transportasi meliputi pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi darat, pengembangan infrastruktur pelabuhan dan pengembangan transportasi air dan pengembangan infrastruktur bandar udara dan pengembangan transportasi Udara.



Strategi Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2020-2025.

A. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan dan Transportasi Darat

1. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Sistem Jaringan Jalan merupakan satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan yang hirarkis.

Secara umum, pengembangan sistem jaringan jalan di Kaltara meliputi pengembangan Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota, dimana dalam pengembangannya disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

No.	Kewenangan	Panjang (km)
1.	Nasional	1.573,47
2.	Provinsi	851,88
3.	Kab./Kota	2.464,39
	Total	4.889,74

Panjang Ruas Jalan Eksisting di Kaltara





Jalan Akses Perbatasan Ruas Malinau – Long Semamu – Long Bawan





Jalan Long Bawan – Long Midang (Batas Negara)





Jalan Akses Perbatasan Ruas Long Nawang – Batas Negara

Jalan Nasional

Terdapat 38 ruas Jalan Nasional di Kaltara, terdiri dari 33 ruas jalan yang ditetapkan statusnya sebagai jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan dan Jalan Kolektor Primer 1 dan 5 Ruas jalan Strategis Nasional yang masuk dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020 – 2040 berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023.

Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Utara mayoritas merupakan bagian dari jalan trans kalimantan, dimulai dari batas Bulungan – Berau (Kaltim) hingga Sei. Ular di Seimanggaris. Selain itu juga terdapat beberapa ruas jalan nasional yang berada di perkotaan diantaranya di dalam kota Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan dan lingkar pulau Sebatik.

Sedangkan Jalan Strategis Nasional merupakan jalan yang mendukung Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) di Kaltara berupa jalan akses perbatasan dan jalan paralel perbatasan. Kondisi jalan mayoritas masih berupa jalan tanah dan belum memenuhi standar laik fungsi jalan sehingga saat ini masih belum dapat dilalui kendaraan umum.

Jalan Strategis Nasional di Kaltara yaitu Jalan Akses Perbatasan Ruas Mansalong – Tau Lumbis (Akses PKSN Tau Lumbis), Akses Perbatasan Ruas Malinau – Long Semamu – Long Bawan (Akses PKSN Long Midang), Jalan Akses Perbatasan Ruas Long Nawang – Batas Negara (PKSN Long Nawang) dan Jalan Paralel Perbatasan Ruas Malinau – Long Pujungan – Long Nawang – Long Boh (Batas Kaltim – Kaltara).

Jalan Provinsi

Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 851,877 Km, terdiri dari 50 ruas jalan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.145/2018 Tanggal 29 Januari 2018.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem jaringan jalan primer, jalan provinsi sebagaimana fungsinya merupakan Jalan Kolektor Primer 2 dan Jalan Kolektor Primer 3 yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibu kota Provinsi dan Kabupaten serta menghubungkan antar ibu kota Kabupaten, selain itu juga sebagai akses pendukung terhadap Kawasan Strategis Provinsi yang tertuang dalam RTRW Prov. Kaltara Tahun 2017 – 2037.




Jalan Tanah Kuning - Mangkupadi

Jalan Kabupaten / Kota

Jalan Kabupaten/Kota merupakan jalan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau Kota, yang perannya adalah memastikan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan tersebut. Jalan ini umumnya berfungsi untuk melayani lalu lintas dalam wilayah administratif kabupaten atau kota, yang mencakup jalan lokal dan jalan penghubung antar kawasan dalam Kabupaten/Kota.

Pengembangan Transportasi Darat

Pembangunan pada sektor perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok daerah serta membuka akses bagi pembangunan sektor-sektor lain seperti pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Beberapa simpul transportasi di Kalimantan Utara belum optimal dengan keterkaitan sistem transportasi multimoda, ada beberapa hal yang menjadi sebab belum terlaksananya sistem transportasi multimoda yang berkelanjutan salah satunya adalah

A	Program Pembangunan/Pengembangan Sarana/Prasarana Transportasi	Jumlah dan Kondisi eksisting	Kebutuhan Jangka Pendek	Keterangan
a	Terminal Penumpang	tidak ada	2	1 Terminal tipe A 1 Teriminal tipe B
b	Terminal Barang	tidak ada	2	Sudah termasuk dalam sarana dan prasarana terminal tipe A dan tipe B
c	UPPKB	tidak ada	2	Jembatan timbang di Ruas jalan nasional dan ruas jalan akses KI Tanah Kuning
d	Area Traffic Control System	tidak ada	1	Kota Tarakan
e	Koridor BRT	tidak ada	2	Tanjung Selor - Tanjung palas dan Tanjung Selor - Bumi Rahayu
f	Koridor Layanan Buy The Service (BTS)	tidak ada	-	-
g	Rute Angkutan Perintis	3 rute	1	Rute existing : Malinau - Salang dan Tanjung Selor - KTT, Tanjung Selor - Malinau Kebutuhan baru : Salang - Sei Ular
h	Sarana Angkutan (Bus dan Angkutan Umum)	7 armada	2	Armada trayek Salang - Sei Ular

belum terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang menuju pelayanan multimoda.

Di sektor transportasi darat di Kalimantan Utara, pelayanan antar kabupaten/kota belum sepenuhnya terlayani optimal karena hanya dilayani oleh angkutan perintis yaitu PERUM Damri dengan jumlah 7 armada dan 3 trayek yaitu Tanjung Selor - Kabupaten Tana Tidung, Tanjung Selor - Malinau dan Malinau – Mansalong, adapun sarana lainnya yang melayani sektor transportasi darat yaitu travel yang mempunyai badan usaha namun belum memiliki izin trayek.

Sampai saat ini Kalimantan Utara belum memiliki prasarana terminal tipe A ataupun tipe B yang merupakan simpul lalu lintas yang sangat penting bagi turun naiknya penumpang dan barang selain itu juga berfungsi sebagai pengontrol dan pengendali kinerja angkutan umum.

B. Infrastruktur Pelabuhan dan Pengembangan Transportasi Air

1. Infrastruktur Pelabuhan

Pengembangan pelabuhan di Kalimantan Utara tidak lepas dari Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang ada di dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Pelabuhan sendiri memiliki peran sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya, sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan.



Pelabuhan Sei. Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan



Pelabuhan Tengkayu I Kota Tarakan



Bandara Juwa Kota Tarakan

2. Pengembangan Transportasi Air

Di sektor transportasi perairan Kalimantan Utara ditopang oleh transportasi laut dan sungai sebagai akses utama perpindahan barang, orang dan jasa selain transportasi udara, faktor utamanya adalah kondisi geografis Kalimantan Utara dan kondisi akses jalan yang saat ini belum mencapai kondisi kemantapan yang optimal terutama untuk akses pada daerah perbatasan.

Adapun pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk saat ini terdapat 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Tengkayu 1 di Kota Tarakan dan Pelabuhan Liem Hie Djung di Kabupaten Nunukan. Untuk Pelabuhan Tengkayu 1 melayani trayek Tarakan - Tanjung Selor, Tarakan - Malinau, Tarakan - Kabupaten Tana Tidung, Tarakan - Nunukan dan Tarakan - Tanah Kuning (Kabupaten Bulungan) sedangkan Pelabuhan Liem Hie Djung melayani Trayek Nunukan – Tarakan.

C. Infrastruktur Bandar Udara dan Pengembangan Transportasi Udara

1. Bandar Udara

Bandar Udara memiliki peran penting dalam mensinergikan antar-unsur yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan dalam rangka mencapai tujuan nasional.



Bandar udara berfungsi dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas; mendukung pertumbuhan ekonomi; mendorong sektor pariwisata; mempercepat distribusi barang dan logistik; Meningkatkan akses ke layanan Kesehatan, pertanahan keamanan dan keadaan darurat; menunjang pengembangan wilayah dan memperkuat peran strategis daerah. Bandar udara di Kalimantan Utara terdiri dari bandar udara Internasional dan bandar udara domestik, baik sebagai bandara pengumpul *(hub)* maupun bandar pengumpan *(spoke)*.

2. Pengembangan Transporta si Udara

Sektor transportasi udara di Propinsi Kalimantan Utara merupakan sarana utama perpindahan barang dan jasa terutama pada wilayah perbatasan yang didukung oleh delapan lokasi bandar udara yang tersebar di empat Kabupaten/Kota.

Pelayanan angkutan udara yang berada di wilayah Kalimantan Utara pada umumnya sudah berjalan optimal, namun terdapat beberapa kendala permasalahan yang perlu segera diselesaikan yaitu beberapa lapangan terbang yang melayani kawasan perbatasan belum didukung sarana infrastruktur yang memadai sesuai dengan standar verifikasi Otoritas Tatanan Kebandar Udaraan Nasional dan keterkaitan

multimoda.

D. Rencana Pengembangan di Masa Mendatang

Rencana pengembangan infrastruktur transportasi di Kalimantan Utara didasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang berkembang.

Lebih lanjut dari kebutuhan dan perwujudan dari pembangunan penyelenggaraan transportasi wilayah dituangkan kedalam arahan pengembangan yang secara vertikal selaras dengan arahan umum kebijakan rencana pembangunan baik jangka panjang daerah (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD), dan arahan kebijakan keruangan melalui Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai refleksi dari rencana pembangunan.

Pengembangan Jaringan Transportasi Angkutan Jalan

1. Pengembangan Terminal Lintas Batas Negara
2. Penyediaan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A
3. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B (Trayek AKDP)
4. Penyediaan Trayek Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Lintas Batas Negara
5. Penyediaan Trayek Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Provinsi Kalimantan Utara
6. Penyediaan Angkutan Pemadu Moda
7. Penyediaan Layanan Angkutan Barang
8. Penertiban dan Penetapan Fungsi dan Manfaat Jalan
9. Penetapan Fungsi Jalan
10. Pengembangan Konektivitas Jalan
11. Pengembangan Konektivitas Jembatan
12. Pemeliharaan Kelas Jalan

Pengembangan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Danau

1. Penyediaan dan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Internasional
2. Penyediaan dan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Provinsi Kalimantan Utara
3. Penyediaan Rute Angkutan Sungai dan Danau Lintas Batas Negara
4. Penyediaan Rute Angkutan Sungai dan Danau Provinsi Kalimantan Utara
5. Penyelenggaraan Keselamatan
6. Pengembangan Jaringan Transportasi Angkutan Sungai dan Penyeberangan
7. Penyediaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Internasional
8. Penyediaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Utara
9. Penyediaan Rute Penyeberangan Lintas Batas Negara
10. Penyediaan Rute Penyeberangan Antar Provinsi

Pengembangan Pelabuhan Laut di Provinsi Kalimantan Utara

1. Trayek Penumpang Angkutan Laut
2. Trayek Angkutan Barang Antar Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara

Pengembangan Jaringan Transportasi Angkutan Udara

1. Pengembangan Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Utara
2. Penyediaan Rute Penerbangan Pengumpan - Pengumpul
3. Penyediaan Rute Perintis – Pengumpan

Diharapkan melalui proses penyusunan Tataran Transportasi Wilayah yang mempertimbangkan isu dan kondisi penyelenggaraan transportasi wilayah dapat menjadi intervensi, akselerasi, implementasi, sinergis dan sinkron dengan kebijakan struktur ruang dan pola ruang pada RTRW sebagai refleksi dari arah pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. (RSL)





Pada era digital saat ini, peran teknologi mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang handal menjadi faktor penting untuk percepatan implementasi industri. Namun pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia masih tertinggal bahkan jika dibandingkan dengan negara anggota *Group Twenty* (G20) lainnya.

Teknologi digital merupakan kunci atas upaya pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor, termasuk untuk mendukung perdagangan, industrialisasi dan investasi yang inklusif, meningkatkan produktivitas, serta membuka potensi ekonomi masa depan khususnya bagi UMKM dan start-up.

Akses internet cepat atau *broadband* sudah menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi di era digital. Kehadiran layanan internet akan berdampak kepada perekonomian. Tidak hanya ekonomi, konektivitas juga berdampak kepada sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan akses internet akan mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik sesuai visi Indonesia Emas 2045. Namun penyediaan akses internet di Indonesia menghadapi tantangan geografis untuk mempercepat konektivitas. Keterbatasan operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet, mendorong pemerintah menyediakan akses internet ke seluruh wilayah, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

AKSES INTERNET PERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI



Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus mempercepat penyelesaian dan optimalisasi program pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi melalui pembangunan BTS, jaringan serat optik Palapa Ring dan pengoperasian satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1. Semua program tersebut bertujuan untuk memeratakan akses dan harga dari layanan internet cepat *(broadband)* di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. BAKTI menargetkan seluruh desa di Indonesia masuk dalam jaringan internet pada 2025.

Di Provinsi Kalimantan Utara konektivitas jaringan telekomunikasi di desa masih menjadi permasalahan. Lokasi geografis sejumlah desa yang sulit dijangkau dan minimnya jumlah masyarakat, disinyalir melatarbelakangi kondisi tersebut. Pengoperasian SATRIA-1 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menopang layanan akses internet dengan kecepatan hingga sekitar 5 Mbps. Sebagai pengendali di bumi, Kominfo-BAKTI membangun 11 stasiun bumi *(gateway)* yang salah satunya dibangun di Kota Tarakan.



Data Dari DKISP Provinsi Kalimantan Utara tercatat terjadi penurunan yang signifikan pada lokasi *blankspot* di Kaltara dimana pada tahun 2021 sebanyak 32 titik dan pada tahun 2024 tinggal 12 titik. Kemudian titik wifi pada tahun 2021 sebanyak 51 titik kemudian meningkat menjadi 200 titik pada tahun 2024.

Persebaran BTS PASTI BAKTI di Kalimantan Utara yaitu di Kabupaten Malinau sebanyak 47 titik, diantaranya terdapat di Desa Data Baru Kecamatan Sungai Boh, Desa Long Metun Kecamatan Kayan Hilir, Desa Long Bena Kecamatan Pujungan dan Desa Long Kemuat Kecamatan Bahau Hulu.

Kabupaten Nunukan terdapat 45 titik, diantaranya yaitu di Desa Suyadon Kecamatan Lumbis Ogong, Desa Pelaju Kecamatan Sembakung dan Desa Bungayan Kecamatan Krayan Timur.

Sedangkan di Kabupaten Bulungan sebanyak 3 titik yaitu di Desa Long Buang Kecamatan Peso, Desa Naha Aya Kecamatan Peso Hilir dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak.

Diharapkan keberadaan BTS tersebut akan memperkuat sejumlah bidang di antaranya pendidikan, kesehatan ekonomi, hingga sosial. Semakin kuatnya sejumlah bidang tersebut, akan berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (AS)

MEMBANGUN KONEKTIVITAS PADA DESA GAMBUT

Oleh GIZ

Desa bergambut pada umumnya berada di lokasi yang terpencil dan memiliki kondisi yang ekstrim secara geografis. Hal ini menjadikan beberapa desa bergambut berada pada daerah yang tertinggal, terluar dan terdepan (3T), termasuk beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Utara.



Terdapat 7,95 % desa di Indonesia memiliki status desa tertinggal dan 8 desa berada di desa gambut di Kabupaten Nunukan yaitu Desa Tagul, Tepian, Lubakan, Pelaju, Manuk Bungkul, Pagar, Labuk dan Butas Bagu.

Desa tertinggal atau desa pramadya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelola potensinya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Secara nyata bahwa desa tertinggal merupakan desa yang memiliki akses dan ketersediaan terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang minim.

Pembangunan Infrastruktur Untuk meningkatkan Ekonomi Desa

Kondisi infrastruktur dasar pada 8 desa bergambut tersebut yang menjadi tantangan dalam mencapai kemandirian desa. Sebagai contoh persoalan akses jalan, Desa Tagul, Pelaju dan Tepian yang berada di Kecamatan Sembakung hanya memiliki akses perairan yaitu melalui jalur Sungai Sembakung. Belum ada akses jalan darat menuju ibukota kecamatan, yaitu ke Desa Atap maupun daerah lainnya.

Jarak tempuh dari Desa Tepian ke ibukota kecamatan memerlukan waktu 3 jam melalui jalur sungai atau 1 jam 30 menit untuk menuju Tarakan. Hal ini mengakibatkan pemenuhan infrastruktur penunjang dan dasar lainnya seperti listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, komunikasi dan lainnya sulit terbangun akibat biaya yang relatif mahal.

Desa Tagul dan Tepian masih belum dialiri jaringan listrik dan air bersih. Sedangkan kondisi jalan desa masih menggunakan papan ulin. Fasilitas pendidikan yang tersedia di kedua desa tersebut yaitu SD dan SMP dengan kondisi yang terbatas. Terbukanya akses jalan akan membuka keterisolasian wilayah dan memperbaiki kualitas hidup di wilayah pedesaan *(rural area).* Pembangunan yang merata akan memudahkan desa mengejar laju pertumbuhan dan tercapainya pemerataan pembangunan.

Dalam kerangka Desa Mandiri Peduli Gambut, konektivitas memiliki peranan yang penting terutama pada program revitalisasi mata pencaharian masyarakat. Terbangunnya konektivitas infrastruktur dari desa bergambut ke luar desa juga memberikan peluang distribusi barang maupun produk lokal gambut dan pemasarannya. Mobilitas masyarakat diharapkan akan meningkat dengan kemudahan trasportasi yang berdampak pada frekuensi dan volume transaksi ekonomi. Hal ini tentunya akan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan pertumbuhan ekonomi desa.

Jaringan yang terhubung antar desa gambut bersifat produktif dan memberikan dampak transformatif pada masyarakat. Konektivitas digital membuka kesempatan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan dunia luar serta peluang lain seperti pendidikan, akses pasar dan informasi serta pelayanan kesehatan. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terkait harga pasar, teknologi pertanian, tren permintaan yang akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan pendapatan melalui inovasi bisnis.





Pembangunan Ramah Gambut Mendukung Kemandirian Desa Gambut

Konektivitas di daerah pedesaan merupakan pendorong penting bagi pembangunan ekonomi, inklusi sosial, peningkatan layanan publik, dan kelestarian lingkungan. Yang dimaksud konektiftas disini adalah "menyambungkan" desa-desa bergambut dengan akses transportasi yang ongkosnya murah, mudah diakses dan terjadwal.

Kondisi daya dukung lingkungan dan pengendalian ekosistem menjadi poin penting dalam meningkatkan adaptasi pembangunan terhadap perubahan iklim. Ekosistem gambut meliputi fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem gambut. Pembangunan desa termasuk pembangunan infrastruktur sebaiknya diarahkan pada areal fungsi budidaya ekosistem gambut dengan konstruksi tertentu yang meminimalisir kerusakan ekosistem gambut.

Bila pembangunan badan jalan merupakan satu-satunya pilihan maka pembangunan jalan harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah pembangunan di ekosistem gambut seperti menggunakan tiang pancang atau teknologi lain yang ramah gambut.

Banyak contoh di beberapa jalan wilayah Kalimantan, kondisinya memperihatinkan akibat memotong lahan gambut yang luas sehingga mengalami penurunan. Pembangunan jalan biasanya diikuti oleh pembangunan kanal di kiri kanan jalan. Kanal memicu kerusakan gambut akibat keluarnya air gambut yang membuat gambut menjadi kering dan mengalami penurunan. Kerusakan gambut merupakan sumber emisi karena lahan gambut kaya akan karbon.

Pengeringan gambut juga dapat memicu kebakaran lahan dan/atau kekeringan sehingga dapat mengancam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan ramah gambut menjadi salah satu kunci kemandirian desa baik kemandirian sosial, ekonomi dan ekologi serta mendukung pembangunan ekonomi Inklusif. (GIZ)



SIDANG KE II TKPSDA WS KAYAN TAHUN 2024

Tanjung Selor – Sidang ke II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Kayan Tahun 2024, pada 26 s.d 28 Agustus 2024 sukses dilaksanakan di Hotel Grand Pangeran Khar Tanjung Selor. Kegiatan ekspose ini dilakukan secara *hybrid* dihadiri oleh Anggota TKPSDA Unsur Pemerintah, Anggota TKPSDA Unsur Non Pemerintah serta Tim Sekretariat TKPSDA WS Kayan.Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan juga sebagai ketua Tim TKPSDA, Bertius, S.Hut.

Sidang Ke II ini memiliki agenda Pembahasan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) WS Kayan, Pembahasan Draft RPSDA WS Kayan dan Evaluasi Akhir Masa Jabatan Anggota TKPSDA WS Kayan Periode 2019 – 2024.



Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) adalah turunan dari rencana alokasi air jangka panjang seperti pada Pola Pengelolaan SDA dan Rencana Pengelolaan SDA WS untuk berbagai pengguna SDA selama satu tahun ke depan.

Dengan disusunnya RAAT ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan dan penggunaan air yang adil, efisien, dan berkelanjutan agar sumber daya air yang ada dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat atau pengguna setempat.

Rencana alokasi air disusun berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan. Alokasi air memuat rencana alokasi air untuk sektor air minum, irigasi, rumah tangga, perkantoran dan industri, energi listrik dan aliran ekosistem sesuai hidrologi.

Penyusunan alokasi air menggunakan data hujan, debit, iklim, prakiraan musim hujan, geografis pos hidrologi dan *headwork,* daerah irigasi, mata air, penduduk, kebutuhan penyediaan air serta data Rencana Tata Tanam.

Dalam pendekatan pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan menggariskan perlunya disusun dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.

Pembahasan terakhir adalah tentang Evaluasi akhir masa jabatan anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Kayan merupakan proses penilaian terhadap kinerja dan pencapaian anggota tim selama masa jabatannya.
Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana anggota TKPSDA WS Kayan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang diberikan. Aspek yang dievaluasi diantaranya Kinerja dalam Koordinasi Antar Instansi, Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Masalah dan Kepatuhan terhadap Peraturan.
(RSL)





LOKAKARYA PEMBAHASAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS DI KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor - Di tengah komitmen yang semakin kuat untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan lokakarya pembahasan kebutuhan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) pada hari Rabu (25/9). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di daerah.

Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Suriansyah M.AP, yang mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan berkumpul. “Hari ini, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan tidak mengabaikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya dengan tegas.

Dalam pembukaan acara, Sekda menekankan bahwa perencanaan yang memperhatikan inklusi sosial merupakan harapan besar dalam proses pembangunan. “Keberhasilan pembangunan harus diukur dari seberapa baik kita melayani semua lapisan masyarakat. Itu termasuk memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas,” lanjutnya.

Urgensi Penyusunan RAD-PD

Berdasarkan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Provinsi Kalimantan Utara memiliki sekitar 46.447 penyandang disabilitas. Angka ini menunjukkan urgensi penyusunan RAD-PD agar segera dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. “Dokumen ini tidak hanya sekadar





> *Berdasarkan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Provinsi Kalimantan Utara memiliki sekitar 46.447 orang penyandang disabilitas.*

formalitas, tetapi merupakan panduan untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi," tegas Suriansyah.

Dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) harus menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan yang inklusif. "Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan yang sama di segala bidang bagi penyandang disabilitas," ujarnya, menjelaskan pentingnya peraturan tersebut.

Kolaborasi untuk Kesejahteraan Bersama

Lokakarya merupakan hasil kolabrasi dengan pihak SKALA (Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar) dihadiri oleh perwakilan dari organisasi perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas (OPDIS), serta organisasi masyarakat sipil se-Kalimantan Utara. Mereka diajak untuk bersama-sama membahas dan memberikan masukan mengenai rencana aksi yang akan disusun.

Salah satu peserta, Nurul Saadah, tenaga ahli GEDSI SKALA nasional, menyatakan bahwa partisipasi aktif dari semua pihak sangat diperlukan. "Kita harus mendengar suara penyandang disabilitas dan memastikan bahwa rencana yang kita susun benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka," ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, peserta berkolaborasi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Mereka sepakat bahwa diperlukan tindakan konkret dalam hal kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, lokakarya ini diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. "Kita harus bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga, tanpa terkecuali. Dengan RAD-PD, kita dapat memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas lebih diperhatikan," ujar Suriansyah.

Akhir sambutan, Sekda menutup dengan harapan agar semua pihak dapat bekerja sama demi tercapainya tujuan yang lebih inklusif. "Mari satukan langkah untuk kesejahteraan seluruh warga Kalimantan Utara. Dengan semangat ini, kita bisa mewujudkan kebijakan yang lebih baik untuk penyandang disabilitas," tutupnya.

Dengan adanya lokakarya ini, harapan akan masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Utara semakin nyata. (RO)

MEMBANGUN MASA DEPAN KALTARA : WORKSHOP PEMANFAATAN DATA SEPAKAT REGSOSEK UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tanjung Selor - Di tengah udara segar Tanjung Selor, puluhan peserta berkumpul di ruang seminar yang dipenuhi dengan harapan dan semangat. Mereka adalah perwakilan dari berbagai instansi dan komunitas, bersatu dalam misi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih mengintai Provinsi Kalimantan Utara. Dalam dua hari ke depan, mereka akan mendalami pemanfaatan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025-2029. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Luminor pada (26/9) ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Suriansyah M.AP.

Dalam sambutannya, Beliau mengungkapkan pentingnya workshop ini. “Kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah kita capai. Namun, tantangan penanggulangan kemiskinan masih ada di depan mata,” ujarnya dengan tegas. Menggenggam data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Suriansyah M.AP menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2024 tercatat sebanyak 47,83 ribu jiwa, berkurang 0,14 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Meski angka ini menunjukkan kemajuan, tingkat kemiskinan ekstrem yang masih mencapai



0,34% atau setara dengan 2.560 jiwa menjadi pengingat bahwa pekerjaan mereka belum selesai.

Menggali Akar Masalah

Workshop ini tidak hanya sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga momen untuk menggali akar masalah kemiskinan di Kalimantan Utara. Para peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis data Regsosek yang baru saja diakses oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, program kemitraan pemerintah Indonesia dengan Australia juga diakui perannya. Program SKALA, yang mendukung pemerintah provinsi dalam pemanfaatan data Regsosek, menjadi salah satu contoh kolaborasi yang efektif. “Dengan dukungan ini, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih efisien dan berbasis data,” tambahnya.

Menuju Rencana Aksi yang Terukur

Dokumen RPKD yang akan disusun selama workshop ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga alat ukur dalam menilai keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan. Setiap langkah harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting mengingat kompleksitas tantangan yang ada, terutama dalam konteks masyarakat Kalimantan Utara yang beragam.

Momen ini adalah langkah kecil menuju perjalanan panjang yang harus ditempuh. Namun, dengan tekad dan sinergi yang kuat, tidak ada tantangan yang tidak dapat diatasi. Dalam beberapa tahun ke depan, Kalimantan Utara berharap dapat melihat perubahan nyata, di mana kemiskinan bukan lagi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. (RO)

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN TBC DI KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor – Dalam upaya menanggulangi penyakit Tuberkulosis (TBC) yang terus meningkat, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara mengadakan rapat penting di ruang rapatnya pada Jumat (20/9) pagi. Rapat yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dipimpin oleh Kabid Sosial, Budaya, dan Pemerintahan Mufied Azwar, S.PT, membahas pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan TBC yang diharapkan dapat mempercepat penanganan penyakit ini.

Salah satu poin utama yang diangkat adalah posisi Indonesia yang menduduki urutan kedua di dunia untuk jumlah kasus TBC. Data terbaru menunjukkan bahwa Tarakan dan Nunukan menjadi daerah paling terjangkit, dengan peningkatan jumlah pasien yang dilaporkan dari berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Dari laporan, 38% dari pasien yang terdiagnosis adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kelompok ini.

Pencegahan yang dilakukan selama ini melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi dirasa belum cukup efektif. Para peserta rapat menekankan pentingnya inisiatif dari pasien sendiri untuk menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas. Jika tidak, risiko terkena TBC Resisten Obat menjadi ancaman serius. Untuk itu, upaya penanggulangan diharapkan melibatkan semua sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial, agar kolaborasi ini bisa terwujud.

Dalam rangka mencapai target penurunan TBC pada tahun 2030, yaitu 65 per 100.000 penduduk dan penurunan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk, pemda diharapkan segera menyusun payung hukum terkait penanggulangan TBC serta mendukung pembentukan Tim Koordinasi. Rapat juga membahas penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanggulangan TBC, di mana setiap dinas diberikan tugas spesifik. Dinas Kesehatan akan bertanggung jawab atas pencegahan dan pelayanan, sedangkan Dinas Pendidikan akan memasukkan bahaya TBC ke dalam kurikulum pendidikan dan melakukan skrining di sekolah-sekolah.







Lebih lanjut, Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk mengedukasi perusahaan mengenai pentingnya pencegahan TBC di tempat kerja, sementara Diskominfo akan membantu dalam penyebaran informasi. Rapat diakhiri dengan penegasan pentingnya data akurat untuk mendukung semua upaya ini, dan Dinas Kesehatan diagendakan akan mengadakan rapat tindak lanjut guna penyampaian progres RAD dan TIM penanggulangan TBC.

Dengan adanya pembentukan Tim Koordinasi ini, diharapkan dapat menjadi langkah *ultimate* dalam menanggulangi penyakit TBC di Provinsi Kalimantan Utara, memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk hidup lebih sehat. (RO)





FORUM SOSEK MALINDO BAHAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA

Balikpapan – Upaya kerjasama melalui Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia (Sosek Malindo) terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini tertuang dalam Pertemuan Tim Teknis/Kumpulan Teknikal dan Sidang ke-26 JKK/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kaltara/Peringkat Negeri Sabah di Novotel Balikpapan tanggal 17-18 Juli 2024.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov. Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si selaku ketua Sosek Malindo Provinsi Kalimantan Utara mengungkapkan agenda Sosek Malindo telah masuk tahun ke-7. Di mana, sudah banyak kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara.

"Kerjasama yang terjalin bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan kedua negara. Ia berharap hasil sidang ke-26 yang digelar dapat menjadi rujukan untuk ditindaklanjuti menjadi usulan program baru sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masing-masing negara.

Dalam Kelompok Kerja Sosek Malindo Tingkat Kalimantan Utara terdapat 3 Kertas Kerja yang terdiri dari Kertas Kerja I Bidang Sosial dan Budaya, Kertas Kerja II Bidang Perekonomian, Perdagangan dan Perhubungan, dan Kertas Kerja III Bidang Keamanan dan Pengelolaan Perbatasan.

Pada agenda hari pertama dilaksanakan sidang masing-masing kertas kerja yang di pimpin oleh Ketua Kertas Kerja. Ketua Sidang KK I Drs. Teguh Henri Sutanto, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Sidang KK II Bertius, S.Hut selaku Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan Ketua Sidang KK III Abdul Jalil S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun hal yang masuk dalam pembahasan pada KK I adalah festival seni budaya,prosedur perkawinan, event/acara budaya, kesehatan, kemudahan pendidikan anak pekerja migran Indonesia, kerjasama pendidikan dalam bidang vokasi dan isu baru yaitu virus nipah, untuk mencegah penyebaran/penularan virus Nipah, setiap orang yang berasal dari wilayah kasus Nipah yang masuk ke wilayah Kaltara wajib



memiliki dokumen yang menyatakan orang tersebut bebas dari virus Nipah.

Pada KK II membahas industri dan perdagangan, Kerjasama Pariwisata Kaltara – Sabah, masalah telekomunikasi, konektivitas, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencakup kerjasama budidaya rumput laut, seperti diketahui Provinsi Kaltara saat ini menjadi salah satu Provinsi penghasil rumput laut mentah terbesar se-Indonesia.

Sementara KK III membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Pos Lintas Batas Darat dan Laut, Penyelundupan, Wilayah Perbatasan, Bencana Banjir. Pihak Kaltara menyampaikan bahwa banjir di sungai Sembakung dan Pansiangan akibat bencana alam dan perlu dibahas oleh pakar, dalam sidang kedua belah pihak Indonesia – Malaysia sepakat akan melaksanakan kajian yang hasilnya adalah laporan mengenai tindaklanjut permasalahan banjir di sungai Sembakung dan Pansiangan.

Setelah dilakukan sidang pada masing-masing KK, dihari ke dua dilaksanakan sidang ke 26 Sidang ke-26 JKK/KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kaltara/Peringkat Negeri Sabah. Dalam pembahasannya Kaltara mengusulkan pertemuan Tim Teknis dan Sidang Ke – 27 diadakan pada tahun depan di Kota Melaka, Malaysia dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebelum masuk pada sesi penutup, Pembacaan Risalah Sidang disampaikan oleh Taufik Hidayat, S.TP., M.Si selaku Ketua Sekretariat KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Penandatangan Risalah Sidang dilakukan oleh Datu Iqro Ramadhan, S.Sos.,M.Si selaku Ketua KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan YBhg. Datuk Hajah Diyanah Abdullah selaku Pengerusi JKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah. (NF)





EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH RPJPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025-2045

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau tahun 2025-2045 pada 1 Agustus dan 2 Agustus 2024 bertempat di Kantor Bappeda dan Litbang.

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2045 mengacu pada visi yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 yaitu "Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan", sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara mengusung visi "Kalimantan Utara 2045: Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan"

Pada kesempatan yang sama, Bertius juga menyampaikan terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan/ pemutakhiran sesuai Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/367/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam RPJPD 2025-2045 oleh Bappenas dan Kemendagri, di antaranya 1) Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan; 2) Perubahan nomenklatur sasaran visi nomor 2 menjadi "kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang" serta adanya penambahan indikator "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" pada sasaran visi nomor 5; 3) Perubahan angka target 2025 dan 2045 pada beberapa indikator serta adanya penambahan sub indikator 15 yaitu "Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal"

Mekanisme evaluasi dilakukan dengan memastikan rumusan visi, misi, target sasaran visi, arah kebijakan pembangunan per periode dan pembangunan wilayah, sasaran pokok pembangunan serta indikator utama pembangunan telah selaras dengan pemerintah kabupaten/kota.

Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan RPJPD telah mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan, serta menyempurnakan rencana pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan di daerah. (LO)



WORKSHOP FINALISASI PENYUSUNAN METADATA SATU DATA

Tanjung Selor – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Suriansyah, M.AP memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Workshop Finalisasi Metadata Satu Data Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 di Hotel Luminor Tanjung Selor, Selasa (23/07). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan evaluasi penyusunan metadata yang telah dilaksanakan pada 24 Juni 2024.

Sebagai upaya untuk melaksanakan salah satu aksi yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Kalimantan Utara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.701/2023 tahun 2023-2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memfasilitasi serangkaian pertemuan dan bimbingan teknis penyusunan metadata statistik baik melalui APBD maupun bekerja sama dengan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Berdasarkan hasil laporan pemantauan penyusunan metadata yang dilakukan Pembina Data (BPS) per tanggal 22 Juli 2024, tercatat 6 perangkat daerah yang belum menyusun metadata statistik dan 14 perangkat daerah yang belum mengajukan rekomendasi statistik.



Dalam sambutan penutupnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya penyelarasan dan validasi data untuk mendukung pembangunan yang lebih terintegrasi dan berbasis data yang akurat.

“Diperlukan keseriusan dan komitmen bersama antar penyelenggara SDI Provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan data yang berkualitas sesuai dengan kaidah dan prinsip SDI,” tutur Suriansyah.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan arahan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Mas’ud Rifa’i, S.ST.,M.M, yang menyampaikan pentingnya peran data dalam pembangunan daerah dan bagaimana workshop ini akan membantu memastikan bahwa data yang tersedia dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pihak secara efisien dan tepat guna. Workshop finalisasi metadata dibagi ke dalam tiga desk yang masing-masing dipandu oleh tim fasilitator yang terdiri dari BPS, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Bappeda dan Litbang.

Dengan dilaksanakannya workshop ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan data di Kaltara, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas data untuk pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara. (LO)



PEMBAHASAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2025-2029

Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang bekerja sama dengan Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) melaksanakan Pembahasan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 di Hotel Luminor Tanjung Selor, Selasa (09/07).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr. H. Suriansyah, M.AP membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan pembahasan rancangan teknokratik RPJMD. Turut hadir Tim Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) UGM, perwakilan perangkat daerah provinsi dan Bappeda dan Litbang kabupaten/kota se-Kalimantan Utara serta akademisi.

Kegiatan pembahasan rancangan teknokratik RPJMD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri No. 000.8.2.2/4075/Bangda pada 12 Juni 2024 tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. Rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 merupakan dokumen tahapan paling awal sebelum



> Mengingat pentingnya peran dokumen rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 ini, maka penyusunannya harus berdasar pada data dan kondisi nyata keadaan di lapangan
>
> **SURIANSYAH**
> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

disusunnya dokumen rancangan awal, rancangan akhir dan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029.

RPJMD merupakan rincian operasional dari upaya pelaksanaan arah kebijakan dan pencapaian sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045 untuk periode tahun 2025-2029. Rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 berperan penting dalam mewujudkan visi RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045 sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. Rancangan teknokratik RPJMD selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi yang kemudian akan menjadi salah satu acuan bagi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi dan misi beserta program unggulan dalam melakukan kampanye pemilukada pada masyarakat.

"Mengingat pentingnya peran dokumen rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 ini, maka penyusunannya harus berdasar pada data dan kondisi nyata keadaan di lapangan," tutur Suriansyah.

Rancangan teknokratik RPJMD harus diupayakan pemutakhiran dan peningkatan kelengkapannya sejalan dengan proses penyusunan RPJMD setelah penetapan pemenang kontestasi pemilukada dan pelantikannya.

Mengakhiri sambutannya, Suriansyah meminta agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir berpartisipasi aktif dalam proses penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029.

"Saya mengharapkan keaktifan kita semua dalam memberikan data, informasi, saran dan masukan bagi penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029," tuturnya. (LO)





PENYELARASAN DAN PENAJAMAN RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD 2025-2045

Yogyakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM melaksanakan Penyelarasan dan Penajaman Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 di Universitas Gadjah Mada, Selasa (02/07).

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius, S.Hut. Turut hadir Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara, TGUPPD Provinsi Kalimantan Utara, Bappeda dan Litbang kabupaten/kota se-Kalimantan Utara serta dinas teknis provinsi terkait dengan tematik arah pembangunan.

Terdapat 2 tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyelarasan dan penajaman, yaitu 1) Melakukan penyelarasan dan penajaman terhadap rumusan visi, misi, target sasaran visi, arah kebijakan pembangunan per periode dan pembangunan wilayah, sasaran pokok pembangunan serta indikator utama pembangunan dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Utara; 2) Melakukan penyelarasan dan penajaman terhadap rumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan karateristik wilayah, administrasi wilayah dan tematik urusan (ketahanan pangan dan mitigasi bencana).

Diharapkan melalui kegiatan ini RPJPD dapat dipastikan tersusun secara komprehensif melibatkan seluruh pihak, khususnya pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai langkah percepatan penyusunan rancangan akhir RPJPD sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 bahwa penetapan RPJPD harus dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus tahun 2024. (LO)



FASILITASI RANCANGAN PERKADA TENTANG PERUBAHAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

Tana Tidung - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang telah melaksanakan desk fasilitasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) hari mulai 16 sampai dengan 18 Juli 2024.

Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan (PPDPP) Bappeda dan Litbang, Firmansyah, selaku pimpinan rapat mengatakan P-RKPD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kegiatan fasilitasi dilakukan dalam rangka mengevaluasi sistematika dan substansi dokumen RKPD Kabupaten/Kota, sekaligus menyesuaikan target indikator pembangunan daerah tahun 2024. Tujuannya adalah agar arah pembangunan Kabupaten/Kota selaras dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Fasilitasi P-RKPD merupakan tahap penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan substansi dari P-RKPD dapat disusun secara matang dan sesuai dengan prioritas pembangunan di Kabupaten/Kota. (LO)












ZAINAL A. PALIWANG



Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045. Hal ini juga sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menginisiasi kegiatan diskusi dan kolaborasi pemangku kepentingan terkait, serta memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan menampilkan karya melalui kegiatan *Sustainable Inclusive Economics Development* (SIED) EXPO dengan tema "Strategi Pembangunan Kalimantan Utara Melalui Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045".

SIED EXPO 2024

Langkah awal bagi Kalimantan Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.M.Hum saat membuka SIED Expo 2024 menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang berlangsung pada 18-19 September 2024 tersebut.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Kaltara juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, S.Hut menyampaikan bahwa SIED Expo 2024 ini diyakini menjadi langkah awal bagi Kaltara untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki dan dukungan dari berbagai pihak, Kaltara memiliki masa depan yang cerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas RI, Tri Dewi Virgiyanti. Dalam paparannya, ia menyatakan perubahan paradigma pengembangan ekonomi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Perubahan tersebut yakni merubah dominasi ekonomi dari ekonomi konvensional seperti sektor pertambangan ke ekonomi hijau, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.

“Dan ekonomi biru yang mencakup pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, ini harus terus dimaksimalkan” tutur Tri Dewi Virgiyanti.

Kegiatan Talkshow ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

1. Penyampaian konsep Transformasi Ekonomi Inklusif sebagai Strategi Percepatan Pembangunan;
2. Penyampaian konsep Membangun Kolaborasi Inovatif untuk Menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan;
3. Penyampaian konsep Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Biru di Kalimantan Utara;
4. Penyampaian konsep Green Economy sebagai Strategi untuk Mensinergikan Pertumbuhan Ekonomi dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Peran Strategis Mitra Pembangunan dalam Transformasi Ekonomi Inklusif Berkelanjutan di Kalimantan Utara;
6. Penyampaian konsep Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Hijau Berkelanjutan.

“Terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perbankan, UMKM, NGO. Harapan kegiatan ini dapat kemas menjadi lebih baik , forum diskusi ini diharapkan menghasilkan rumusan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 yang tentu akan menjadi referensi untuk Kabupaten/Kota” ujar Bertius dalam *closing statement* yang disampaikan. (NF)









SEMINAR PENDAHULUAN KAJIAN PROFIL DESA

Tanjung Selor - Pada hari Senin (12/8) bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan Seminar Pendahuluan Kajian Profil Desa di Kawasan Perbatasan. Penyusunan kajian ini Bekerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mochamad Sarkawi, S.Hut.M.Eng dan dihadiri oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kaltara.

Dalam sambutannya, Sarkawi menjelaskan bahwa dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Utara memerlukan suatu kerangka penanganan yang spesifik meliputi berbagai sektor pembangunan serta koordinasi yang efektif mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan agar efektif dalam pengembangan wilayah perbatasan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

"Disadari bahwa tujuan Pembangunan pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga pada masanya akan terlahir menjadi masyarakat yang sejahtera," terang Sarkawi.

Sementara itu Peter Pulungan dari Universitas Borneo Tarakan dalam paparannya menjelaskan bahwa kajian terhadap potensi desa di wilayah ini sangat penting untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat lokal, dengan tujuan mengidentifikasi potensi lokal, memahami tantangan dan kebutuhan spesifik, serta mendukung perencanaan pembangunan berbasis data akurat.

Fokus kajian akan mencakup Kabupaten Nunukan dengan pemetaan potensi, penyusunan profil desa, analisis kebutuhan, dan rekomendasi strategi sebagai bagian integral dari proses.

Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengidentifikasi tujuh masalah utama, termasuk isolasi akibat kurangnya jalan dan keterbatasan infrastruktur yang mengganggu ekonomi lokal. Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kelautan, namun pengembangan ekonomi harus diimbangi dengan strategi pertahanan yang efektif untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan.(AS)



BRIN LAKUKAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI DAYA TARIK SEKTOR UNGGULAN

Tanjung Selor - Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan kunjungan dan audiensi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (3/9). Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kajian yang dilaksanakan oleh BRIN mengenai daya tarik sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara.

Delegasi BRIN yang dipimpin oleh Peneliti Ahli Muda Guruh Pratama Kurniawan selain berada di Tanjung Selor juga melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Guruh juga menyinggung tentang tiga peran utama BRIN, yaitu BRIN merupakan penyedia rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam pengembangan dan inovasi teknologi; sebagai *Executive agency* yang mengkoordinasikan pelaksanaan riset melalui 12 Organisasi Riset dan 85 pusat riset di semua bidang ilmu pengetahuan baik ilmu alam, terapan, sosial dan humaniora. Selanjutnya BRIN merupakan *Funding agency* yang menyediakan dana kompetitif untuk riset, mendukung mobilitas peneliti.

Dari hasil diskusi diketehui bahwa di Kota Tarakan lahan pertanian terbatas, sehingga komoditas pertanian yang dijualkan di pasar rata-rata didatangkan dari luar, tidak terkecuali beras dan sembako. Produk perikanan unggulan yang dimiliki Kota Tarakan sendiri diantaranya berupa ikan, udang, dan kepiting, serta rumput laut. Sedangkan di Nunukan memiliki sejumlah potensi ekonomi. Adapun sektor perikanan dan kelautan, rumput laut menjadi andalan utama Kabupaten Nunukan. Komoditas alam yang sangat potensial yaitu Beras Adan yang berasal dari Krayan. Beras Adan sangat berkualitas serta disukai banyak orang dan banyak diekspor terutama ke Malaysia dan Brunei Darussalam. (AS)



BAPPEDA DAN LITBANG GELAR BIMTEK PENGINPUTAN IPKD UNTUK TINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Tanjung Selor - Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menggelar bimbingan teknis penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut dihadiri Tim IPKD dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya BKAD, Bappeda dan Litbang, DKISP dan Inspektorat, dimana tim IPKD mempunyai tugas mengampu sesuai dimensi bidangnya masing-masing.



Acara yang berlangsung via aplikasi *zoom meeting* ini berlangsung pada Kamis, 29 Agustus 2024 dengan menghadirkan narasumber Muhammad Sadik Ul Amin Faruk dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Kemendagri.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mohammad Sarkawi, S.Hut., M.Eng dalam sambutanya menjelaskan mengenai urgensi IPKD bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas. Adapun penginputan IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan.

"IPKD ini menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Melalui IPKD kita dapat memetakan kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan," ungkap Sarkawi.

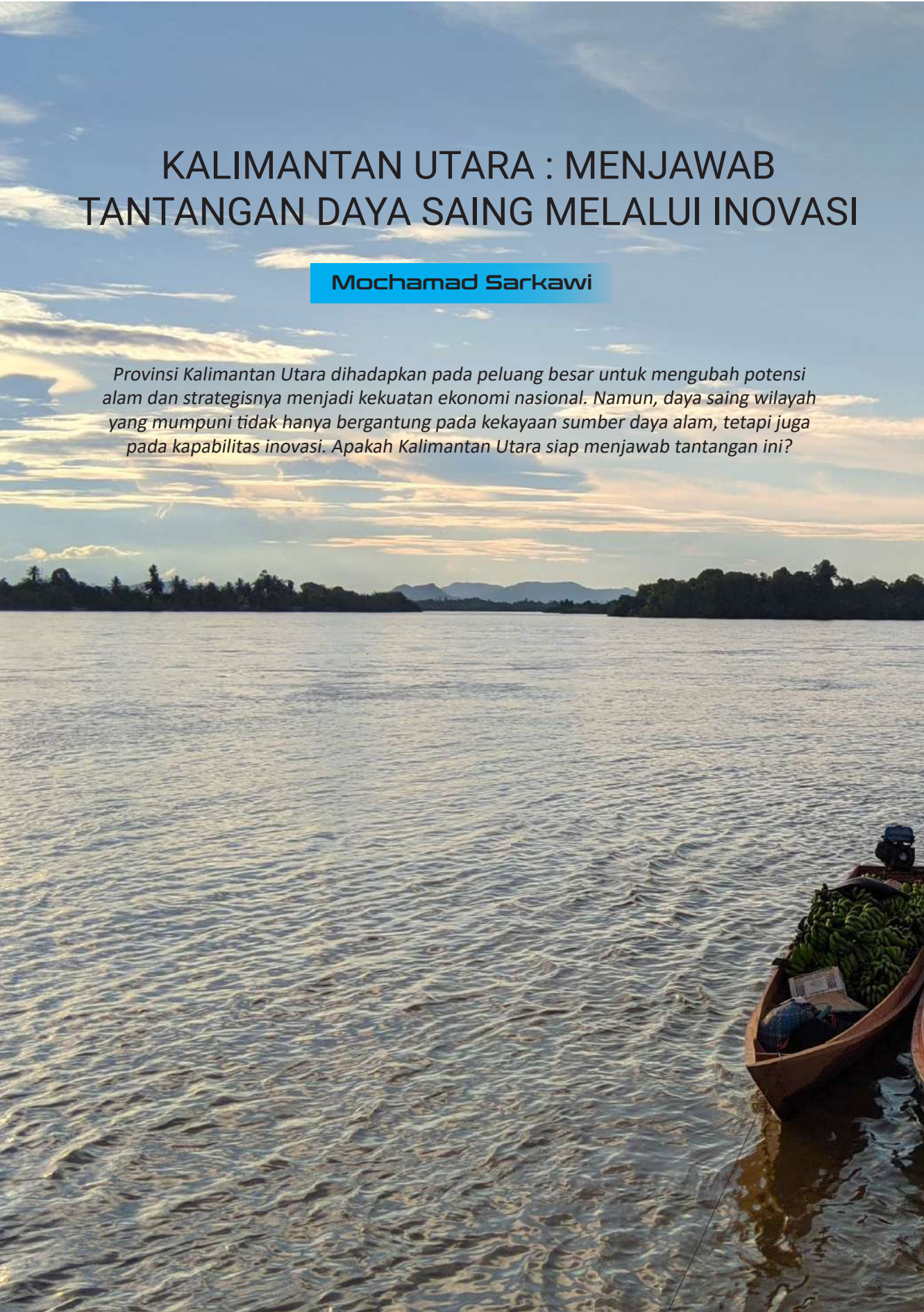
Pada bimtek ini disampaikan terkait teknis penginputan IPKD pada 6 dimensi pengukuran IPKD. Terdapat pembaharuan pada aplikasi IPKD Tahun 2024, diantaranya: perubahan alamat aplikasi pengukuran menjadi https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/; pembagian user untuk setiap perangkat daerah; integrasi antara IPKD dengan SIPD pada dimensi 1, penambahan fitur pada dimensi 2 dan 6; serta statistik hasil pengukuran IPKD pada dashboard.

Pada sesi diskusi, masing-masing Kabupaten/Kota menyampaikan kendala yang dihadapi pada masing-masing dimensi, seperti keteraksesan pada dimensi 3, cara pengukuran dimensi 5, dan penginputan pada dimensi 6. Dengan dilaksanakannya bimtek ini diharapkan nilai IPKD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi lebih baik lagi. (AS)

KALIMANTAN UTARA : MENJAWAB TANTANGAN DAYA SAING MELALUI INOVASI

Mochamad Sarkawi

Provinsi Kalimantan Utara dihadapkan pada peluang besar untuk mengubah potensi alam dan strategisnya menjadi kekuatan ekonomi nasional. Namun, daya saing wilayah yang mumpuni tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kapabilitas inovasi. Apakah Kalimantan Utara siap menjawab tantangan ini?





Kalimantan Utara adalah provinsi muda yang kaya akan potensi. Dengan posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, provinsi ini memiliki landasan yang kuat untuk menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud bila didukung dengan inovasi yang terencana. Dalam laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kalimantan Utara memiliki keunggulan di beberapa pilar, namun masih tertinggal dalam pilar kapabilitas inovasi.

Potensi yang Ada dan Tantangan yang Harus Dijawab

BRIN mencatat, dari 12 pilar daya saing, Kalimantan Utara unggul pada institusi, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan keterampilan. Namun, inovasi yang menjadi jantung pertumbuhan ekonomi modern masih merupakan pekerjaan rumah besar bagi Kalimantan Utara. Provinsi ini perlu meningkatkan kapabilitas dalam riset dan pengembangan (litbang), pengembangan klaster industri, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya inovasi.

IDSD 2023 menunjukkan bahwa skor kapabilitas inovasi Kalimantan Utara masih rendah, terutama pada indikator-indikator seperti pengembangan klaster, belanja riset, dan indeks keunggulan lembaga riset. Di sisi lain, faktor keanekaragaman tenaga kerja dan publikasi ilmiah masih perlu didorong lebih jauh untuk membentuk ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Menjawab Tantangan dengan Strategi Terarah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menerima beberapa rekomendasi kebijakan dari BRIN yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas inovasi di provinsi ini. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang diusulkan untuk menjawab tantangan tersebut.

- Meningkatkan Anggaran Riset

Inovasi tidak akan berkembang tanpa investasi. Kalimantan Utara perlu menambah anggaran untuk riset guna mendorong kegiatan litbang yang menghasilkan teknologi dan solusi baru. Dengan meningkatnya anggaran, diharapkan lebih banyak riset yang relevan dan berdampak langsung bagi pengembangan ekonomi lokal dapat dilakukan.

- Membangun Jaringan Kolaborasi

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi menjadi kunci. Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi program-program yang mempertemukan perguruan tinggi dengan industri, seperti program magang, penelitian bersama, atau inkubator inovasi. Dengan kolaborasi ini, transfer pengetahuan dan pertukaran ide akan semakin intensif, mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang dinamis.

- Mengembangkan Klaster Industri

Klaster industri yang berkembang baik akan mendorong interaksi antar industri dan memudahkan kolaborasi. Di Kalimantan Utara, beberapa sektor potensial untuk dikembangkan dalam bentuk

Tabel 1. Skor Pilar IDSD Kabupaten dan Kota Kalimantan Utara

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3	PILAR 4	PILAR 5	PILAR 6	PILAR 7	PILAR 8	PILAR 9	PILAR 10	PILAR 11	PILAR 12	
NASIONAL	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. KALIMANTAN UTARA	4,55	1,94	3,98	3,79	3,97	3,92	1,81	4,53	1,54	4,06	3,30	1,81	3,26
RATA-RATA KAB/KOTA	4,30	1,94	3,86	3,41	4,01	3,53	1,79	4,15	0,42	4,16	3,35	1,33	3,08
MALINAU	4,25	1,35	2,96	3,51	3,96	3,34	1,11	3,44	0,25	4,04	4,43	0,92	2,80
BULUNGAN	4,22	2,14	3,51	3,65	4,05	3,59	1,97	4,65	0,51	4,21	4,48	1,82	3,23
TANA TIDUNG	-	1,70	4,17	3,21	3,94	3,40	1,07	4,41	0,17	3,70	2,67	0,49	-
NUNUKAN	4,36	2,01	3,71	3,46	3,96	3,26	0,85	3,99	0,47	4,35	2,53	0,89	2,82
KOTA TARAKAN	4,37	2,50	4,95	3,23	4,16	4,07	3,97	4,25	0,72	4,50	2,63	2,53	3,49

(Sumber: Boediastoeti, O., Khairul,R., Yudi, W., (2024). Indeks Daya Saing Daerah 2023. Penerbit BRIN)

klaster adalah pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan kimia berbasis lemak nabati. Klaster ini akan membantu provinsi ini memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, sekaligus menarik investasi dan teknologi dari luar.

- Mendorong Keanekaragaman Tenaga Kerja dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Keanekaragaman tenaga kerja menjadi salah satu indikator kapabilitas inovasi yang masih rendah di Kalimantan Utara. Pemerintah dan pelaku industri perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk berkembang. Selain itu, pendidikan dan pelatihan vokasional yang fokus pada teknologi dan inovasi harus ditingkatkan agar SDM Kalimantan Utara mampu bersaing dan berinovasi.

Infrastruktur Penunjang IPTEK sebagai Modal Inovasi

Dukungan infrastruktur riset dan teknologi (IPTEK) juga memegang peranan penting. Di Kalimantan Utara, kehadiran beberapa perguruan tinggi dan kawasan sains seperti yang ada di Universitas Borneo Tarakan menjadi modal penting. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menciptakan laboratorium riset yang mampu menghasilkan inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Dukungan anggaran yang konsisten untuk fasilitas riset akan memperkuat ekosistem IPTEK di provinsi ini.





Daya Saing Daerah: Kunci Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Dengan memperkuat inovasi, Kalimantan Utara dapat menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Langkah-langkah kebijakan yang tepat, seperti peningkatan anggaran riset, pengembangan klaster industri, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, akan menjadi kunci bagi kemajuan provinsi ini. Kapabilitas inovasi yang kuat tidak hanya meningkatkan daya saing di tingkat nasional, tetapi juga membuat Kalimantan Utara menjadi daya tarik investasi dan teknologi di wilayah Asia Tenggara.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki peluang besar untuk memimpin di sektor ekonomi berbasis inovasi. Dengan menjalankan rekomendasi kebijakan yang tepat, Kalimantan Utara dapat menjadi contoh sukses pembangunan yang berbasis daya saing dan inovasi. Keberhasilan ini tidak hanya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga menjadikan Kalimantan Utara sebagai pusat inovasi dan kekuatan ekonomi baru di Kalimantan dan Indonesia.

Untuk membaca lebih lengkap rekomendasi kebijakan tentang Indeks Daya Saing Daerah ini dapat diunduh di https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id/. (MS)

AUDIENSI BRIN - BAPPEDA DAN LITBANG TERKAIT HASIL PENGUKURAN ITKPP



Tanjung Selor - Bertempat di Ruang Rapat Gunung Putih Bappeda dan Litbang berlangsung kegiatan Audiensi dan Diskusi Hasil Pengukuran ITKPP (Indeks Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada hari Selasa (10/9) dan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius S.Hut.

Diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara termasuk ke dalam 6 daerah *Piloting Project* bersama dengan Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Wahyudi, Perencana Ahli Madya pada Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi, dan Inovasi dalam paparannya menjelaskan bahwa secara umum ITKPP merupakan pemikiran kritis terhadap konsep *"good governance"* yang berfokus kepada perekonomian, dimana ITKPP menggunakan pengukuran dengan prinsip *"proper governance"* untuk menghindari penilaian yang bersifat *one size fits for all.* Indeks berikut dibuat tidak untuk membandingkan secara baik atau buruknya suatu instansi, tapi sejauh apa kontribusi pemerintah. Disusun lebih sebagai pertimbangan untuk kebijakan publik kedepannya.



Terdapat 4 prinsip pengukuran *proper governance*, yaitu demokrasi, pembangunan, inklusivitas sosial, dan kearifan lokal/ konteks kelokalan, yang mana pengukurannya menggunakan data sekunder dan unit analisis di wilayah provinsi.

"Dari 4 prinsip tersebut, inklusi sosial memiliki nilai lebih tinggi dan dapat dibilang menjadi fundamental bagi masing-masing aspek," terang Wahyudi.

Dari hasil nilai indeks, Kalimantan Utara masih berada dibawah total indeks provinsi lainnya, tentu saja dengan pertimbangan, penilaian tersebut kemungkinan besar masih ada data-data yang kurang dan harus dilengkapi.

Kedepan akan dilakukan langkah-langkah seperti identifikasi kebutuhan data untuk memastikan data yang diperoleh lebih lengkap. (AS)

KEMENKUMHAM LAKUKAN HARMONISASI RANPERDA RPJPD DAN RANPERDA RISET DAN INOVASI DAERAH



Samarinda - Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim pada hari Kamis (10/7) diselenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Utara. Hadir langsung dalam kesempatan itu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Mochamad Sarkawi, S.Hut.M.Eng dan Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Ruslim, ST., MT.

Mengawali kegiatan Mia Kusuma Fitriana, S.H., M.Hum, Kepala Bidang Hukum didampingi Kasubbid FPPHD Zainut Taqwim menyampaikan sambutan dan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan oleh Nurul Hidayah, S.H. Adapun rancangan peraturan yang dibahas antara lain Ranperda Riset dan Inovasi Daerah dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Setelah dilakukan pembahasan rancangan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil harmonisasi yang telah disusun Kanwil Kemenkumham Kaltim terkait saran-saran maupun masukan yang disampaikan oleh Nurul Hidayah.

Beberapa masukan, saran dan koreksi dari narasumber secara umum dalah diantaranya penyederhanaan Dasar Hukum, Penambahan Bab Evaluasi dan Pengendalian, Pembetulan Judul Bab dan Penyempurnaan kalimat per Bab.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi penyampaian tanggapan dari perangkat daerah terhadap hasil harmonisasi yang telah dilaksanakan. (AS)

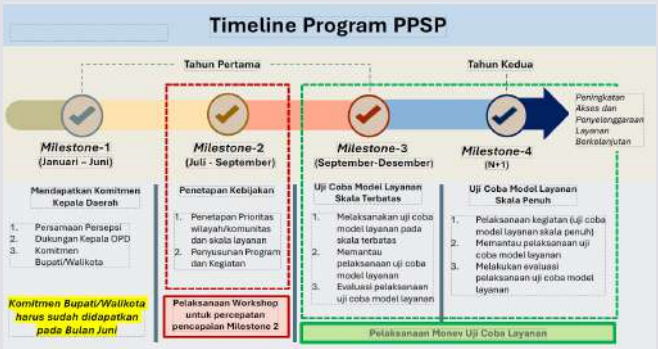
WORKSHOP PRIORITASI PROGRAM KEGIATAN DAN UJI COBA LAYANAN IMPLEMENTASI SSK PROGRAM PPSP



Medan – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan Workshop Prioritasi Program Kegiatan dan Uji Coba Layanan Implementasi SSK Program PPSP Tahun 2024, pada 7-9 Agustus 2024 di Balroom Hotel Mercure Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh Pokja PPAS/PKP/AMPL/SAM/Sanitasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Pendampingan M1-M3. Dari Provinsi Kalimantan Utara dihadiri oleh perwakilan Pokja PKP Prov. Kaltara (Bappeda dan Litbang Prov. Kaltara), Pokja PKP Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan (Bappeda dan Litbang Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, serta DPUPR Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Utara dan Fasilitator Pendamping PPSP.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2024 pada 25 Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai Upaya percepatan pelaksanaan *milestone* 2 dan persiapan *milestone* 3.

Prioritasi program dilakukan karena sumber daya terbatas (sumber daya keuangan, SDM, dsb), perlunya kesempatan mendapatkan pembelajaran /pemodelan layanan, perlunya *quick win* untuk menjaga momentum keberhasilan serta *showcase* untuk kepentingan advokasi pokja. Prioritasi program dilakukan dengan cara menilai tingkat rawan sanitasi di suatu wilayah, memiliki kelayakan implementasi, memiliki potensi keberhasilan tinggi. Pada workshop ini peserta dilatih untuk mampu menentukan program dan kegiatan prioritas, penggunaan SWOT sebagai alat bantu, menyusun kerangka kerja logis (KKL), analisis kebutuhan infrastruktur, internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu usulan kegiatan tahun berjalan dan usulan kegiatan tahun N+1. Eksternalisasi atau pemasaran sanitasi perlu dilakukan agar rencana kegiatan yang diusulkan mendapatkan komitmen pendanaan diluar APBD. Fokus tetap pada kegiatan Tahun Berjalan dan Tahun N+1. Dan terakhir, peserta menetapkan target konsolidasi program/kegiatan dan anggaran dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. (RSL)



SEMARAK HUT RI KE 79 DENGAN LOMBA 17-AN YANG PENUH KECERIAAN



Tanjung Selor - Padatnya rutinitas di kantor tidak mengurangi sedikitpun semangat segenap pegawai di lingkup Bappeda dan Litbang Kaltara untuk mengikuti perlombaan memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.



Sebagian besar pegawai Bappeda dan Litbang turut serta ambil bagian memeriahkan acara yang dilaksanakan di Kantor Bappeda dan Litbang.

Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Ke-79 RI di Bappeda & Litbang Provinsi Kalimantan Utara yaitu perlombaan menghias tumpeng, lomba menghias ruangan , lomba permainan anak-anak, lomba kekompakan tim , dan lomba tenis meja/pimpong.

Semarak Hari Kemerdekaan RI tahun ini , bukan hanya tentang hura-hura dan kesenangan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan di antara Keluarga Besar Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dan mitra kerja (GIZ & GGGI).

Semangat kemerdekaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus bekerja keras dan berkarya demi kemajuan bangsa dan negara. Semangat dan antusiasme yang terlihat dalam setiap perlombaan merupakan bukti bahwa acara semacam ini memiliki dampak positif yang sangat besar, terutama dalam membangun solidaritas di lingkungan kerja.

Kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya, bahkan dengan variasi lomba yang lebih beragam dan melibatkan lebih banyak peserta. Pada penghujung acara, seluruh peserta, baik yang menang maupun yang kalah, berkumpul bersama untuk menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan oleh panitia.

Suasana keakraban semakin terasa saat semua orang saling berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama lomba. Gelak tawa dan senyum ceria menghiasi penutupan acara, yang ditutup dengan foto bersama sebagai kenang-kenangan. (AS)

Sekilas Info



« 22 JULI 2024

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius S.Hut menghadiri pertemuan kelompok kerja pembahasan usulan rencana kerja program SKALA 2024 - 2025



« 22 JULI 2024

Kabid. Prasarana dan Pengembangan Wilayah Ruslim ST., MT mewakili Plt. Kepala Bappeda dan Litbang selaku Ketua Pokja PKP Provinsi Kaltara membuka secara resmi *Coaching Clinic* 1 pendampingan SSK Program PPSP Tahun 2024



« 29 AGUSTUS 2024

Plt. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius S.Hut bersama dengan GIZ melakukan kunjungan ke Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan dalam rangka diskusi proyek kerjasama Indonesia - Jerman SDGS SSTC fase II



« 1 JULI 2024

Pendampingan oleh Bidang Pengembangan dan Prasarana Wilayah dalam Kegiatan Pelaksanaan Survei Lapangan dalam penyusunan *National Urban Development Strategy* (NUDS) Provinsi Kaltara



« 3 JULI 2024

Perencana Ahli Muda, Muhammad Riady menjadi Narasumber pada kegiatan *soft launching* portal Korsa Vista yang berlangsung di Gedung Gabungan Dinas Tanjung Selor.

TANA HATI ACIL (PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN TERPENCIL)

Inovator : Catrice Sheyang & Diana Fauziah
Juara III Kategori Pelayanan Publik

Kondisi infrastruktur wilayah Kalimantan Utara khususnya di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) umumnya masih banyak mengalami keterbatasan termasuk didalamnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Pelayanan kesehatan sudah seharusnya dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan, namun belum semua masyarakat Indonesia menikmati pelayanan kesehatan primer yang mereka harapkan terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan terpencil atau sangat terpencil.

Sehingga bagi masyarakat atau suku kawasan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan umumnya mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, hal ini dapat disebabkan karena kondisi geografis, topografi, akses transportasi, adat budaya, kebiasaan, akses komunikasi, tingkat ekonomi dan sosial yang terbatas. Hal ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di DTPK yang masih memperihatinkan.

UPTD Puskesmas Bumi Rahayu memiliki 2 kawasan yang termasuk desa terpencil yaitu desa Sajau Km 32 dimana terdapat suku Punan Batu yang memiliki kurang lebih sekitar 33 KK dan berjumlah 106 jiwa dan warga km 57 yang merupakan warga perbatasan Tanjung Selor (Kalimantan Utara) - Berau (Kalimantan Timur) memiliki kurang lebih 298 KK dan berjumlah 941 jiwa.

Pelayanan kesehatan di daerah terpencil di km 32 dan km 50 sudah sejak lama dilakukan dalam bentuk Pusling (Puskesmas Keliling) dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) namun belum dilakukan secara optimal. Hal inilah yang mendasari penulis berinisiatif membuat inovasi pendekatan pelayanan kesehatan di kawasan terpencil disingkat Tana Hati Acil.







« **PELAYANAN KESEHATAN**
Puskesmas Keliling ke Suku Punan Batu

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan pelayanan kesehatan primer yang belum optimal di km 32 dan belum terbentuk posyandu tempat pelayanan yang menetap di km 57, maka dibuatlah inovasi Pendekatan Pelayanan Kesehatan Di Kawasan Terpencil TANA HATI ACIL. Ruang lingkup perubahan pelayanan publik dimana pelayanan daerah terpencil km 32 dan km 57 adalah dengan mendatangi langsung lokasi dari masyarakat suku pedalamam di km 32 dan km 57 sehingga mengurangi biaya transport dari masyarakat pedalaman suku punan batu km 32 dan km 57.

Untuk mendukung pelaksanaan inovasi TANA HATI ACIL, dibutuhkan beberapa regulasi terkait pelayanan Pusling dan Posyandu, seperti Advokasi dan pencanangan Posyandu Gerbang Kaltara di km 57 dan advokasi pada pembina suku punan batu (Dt. Abdul Karim) terhadap pelayanan kesehatan yang akan masuk menuju akses tempat tinggal suku punan batu.

Untuk masuk ke wilayah suku punan batu, pembina suku punan batu memberikan fasilitas bantuan berupa 1 buah ketinting yang bisa membawa petugas maksi-

mal 4 orang yang terdiri dari 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan dan 1 apoteker. Dalam hal ini kami dari puskesmas merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pihak tokoh masyarakat selain dana yang didapat dari BOK untuk biaya SPPD petugas. Selama pelaksanaan pusling dan posyandu, di lengkapi dengan sarana prasarana mulai dari obat-obatan dan juga alat kesehatan pendukung lainnya.

Rangkaian kegiatan - kegiatan dalm pelaksanaan TANA HATI ACIL di km 57 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Posyandu km 57 awalnya dilakukan di rumah warga, namun pada tahun 2020 dibentuklah Posyandu Gerbang Kaltara yang diba-



ngun dilahan warga melalui advokasi dengan kepala desa dan pemangku adat serta tokoh masyarakat sehingga terbentuklah Posyandu Gerbang Kaltara.
2. Dengan terbentuknya Posyandu Gerbang Kaltara maka ikut dibentuklah kader posyandu yang berasal dari warga sekitar (pemberdayaan masyarakat) guna membantu dalam pelayanan posyandu dan pusling.
3. Dibuatlah KAK program Yankes Terpadu dan Posyandu serta SOP selama pelaksanaannya setiap tahunnya.



4. Dilakukan Pelaksanaan Posyandu dimana didalamnya terdapat kegiatan promosi kesehatan, pelayanan imunisasi, penimbangan, pemeriksaan ANC ibu hamil, pelayanan GIZI atau pemberian PMT pada bayi atau anak, *screening* DDTK dan kesehatan gigi serta dilakukan puskesmas yankes terpadu dalam bentuk pelayanan pengobatan serta kolaborasi program lain di puskesmas.
5. Monitoring hasil kegiatan di lokakarya mini bulanan puskesmas dan dalam rapat lintas sektor tribulanan.

Rangkaian kegiatan- kegiatan dalm pelaksanaan TANA HATI ACIL di km 32 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Yankes Terpadu km 32 awalnya dilakukan di rumah tokoh masyarakat (Dt. Abdul Karim), namun pada tahun 2023 pelayanan yankes terpadu dilakukan di dalam tempat suku punan batu tinggal, dimana petugas masuk kedalam hutan menggunakan jalur sungai dengan ketinting;
2. Dibuatlah KAK program Yankes Terpadu dan Posyandu serta SOP selama pelaksanaannya setiap tahunnya;
3. Pelaksanaan Yankes terpadu disesuaikan jadwal tahunan yang sudah disepakati dan mengkonfirmasi ulang pada Pembina suku punan jadwal tanggal kegiatan pusling;
4. Dilakukan persiaapan SDM serta sapras yang dibutuhkan selama pusling;
5. Dilakukan Pelaksanaan Yanakes Terpadu km 32 dimana didalamnya terdapat kegiatan pengobatan, promosi kesehatan, penimbangan, pemeriksaan ANC ibu hamil, pelayanan GIZI atau pemberian PMT pada bayi atau anak, serta koloborasi program lain di puskesmas;

Kunjungan Pasien	2020	2021	2022	2023
Yankes Terpadu Km 32	4x setahun 124	4x setahun 144	6x setahun 213	10x setahun 275 (sampai bln September)
Yankes Terpadu Km 57	-	-	-	12 x Setahun 219 (sampai bulan september)
Posyandu gerbang	12 x setahun	12 x setahun	12x setahun	12 x setahun

6. Monitoring hasil kegiatan di lokakarya mini bulanan puskesmas dan dalam rapat lintas sektor tribulanan.

Peningkatkan kesehatan berorientasi sehat dengan strategi promotif dan preventif dalam setiap kegiatan sangat diperlukan agar inovasi TANA HATI ACIL tersebut dapat meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tidak mengabaikan strategi kuratif dan rehabilitatif.

Dukungan dan peran aktif dari lintas sektor, lintas program, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dalam proses perencanaan, aksi, evaluasi dan monitoring kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.

ADMIN SMART (APLIKASI MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN ELEKTRONIK)

Inovator : Fazli Hilmy Pradana
Juara II Kategori Tata Kelola Pemerintahan

Dalam era digital yang semakin maju, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan dan organisasi perkantoran di seluruh dunia menghadapi tuntutan untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan pengalaman pengguna. Aplikasi administrasi perkantoran merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data-data penting sebuah instansi, agar terdokumentasi dengan baik.

Pemanfaatan aplikasi ini banyak memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan. Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada aktivitas administrasi perkantoran telah membangun dan mengembangkan Aplikasi berbasis web yang dinamakan AdminSmart.

AdminSmart (Cerdas dalam Manajemen Administrasi Perkantoran Elektronik) adalah suatu aplikasi online berbasis web yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mengelola administrasi dan aktivitas perkantoran pada Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara. Sistem digital ini hadir sebagai solusi atas permasalahan yang muncul pada proses manajemen dan administrasi perkantoran di Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang masih secara manual/konvensional dan membebani penggunaan ATK yang boros serta waktu pekerjaan yang berulang-ulang.

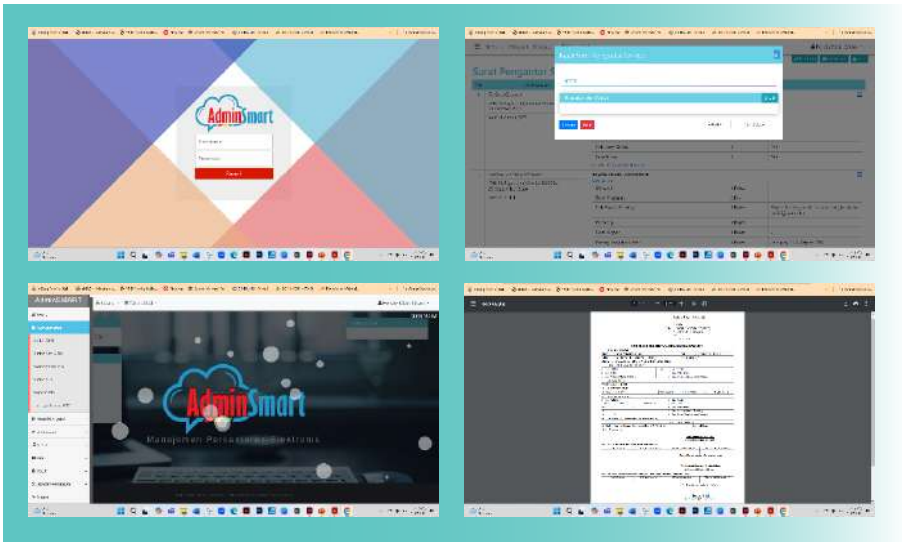
Dalam pelaksanaan inovasi ini, komitmen pimpinan untuk melaksanakan inovasi agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public *(e-Government)* dan mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan pedoman tata naskah dinas elektronik yang berlaku. Hal ini merupakan bagian pembudayaan Inovasi Daerah di Bappeda dan Litbang sesuai dengan Instruksi Gubernur Kaltara nomor 1 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Gerakan One Agency One Innovation.

Dengan budaya inovasi yang kuat dan pendekatan yang terstruktur, Bappeda dan Litbang terus menghasilkan ide-ide baru, meningkatkan daya saing, dan mengatasi tantangan penyelenggaraan pemerintah yang terus berkembang sesuai zamannya.

Kedepan, pengembangan AdminSmart berfokus pada aksesibilitas dan mobilitas dimana aplikasi memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke informasi dan dokumen dari mana saja dan kapan saja. Seluruh pegawai dapat bekerja secara efektif di luar kantor, mengakses informasi penting melalui perangkat *mobile,* dan berkolaborasi dengan rekan kerja atau klien tanpa batasan geografis.

Inovasi ini mendukung pelaksanaan *e-Government* yang tentunya akan melahirkan sebuah pemerintahan yang efesien, efektif dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi serta transparan. Baik itu infrastruktur, sumber daya manusia maupun sistem





aplikasi yang dikembangkan. Dalam perkembangan kedepannya, aplikasi AdminSmart ini bisa diakses penggunanya melalui aplikasi berbasis mobile yang bisa diunduh dan digunakan di smarthpnone masing-masing penggunanya.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi ini dan aksi yang dirancang adalah sebagai berikut:

- Melakukan survey rinci kondisi eksisting aplikasi adminstrasi perkantoran atau adminsmart di Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap kondisi eksisting sistem di Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara serta menganalisis keterkaitan antar sistem dan relevansinya dengan kebutuhan lainnya yang ada Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.
- Koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa atas rancangan *prototyping* aplikasi adminstrasi perkantoran dan menampung saran masukan aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam menfinalisasi perancangan.
- Melaksanakan pengembangan aplikasi adminstrasi perkantoran atau adminsmart Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disepakati.
- Melakukan *Search Engine Optimation* pada aplikasi adminstrasi perkantoran atau adminsmart Bappeda Litbang dan melakukan optimasi.
- Melaksanakan bimbingan teknis kepada operator dan admin aplikasi adminstrasi perkantoran atau adminsmart.

AdminSmart mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi/elektronik dalam era teknologi informasi membantu seluruh ASN Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara cerdas dalam mengelola administrasi perkantoran dengan baik.

Dalam penggunaan AdminSmart, staf atau operator dapat langsung mengakses dengan akun masing-masing, dan selanjutnya dapat memproses administrasi sesuai dengan kebutuhan.

AdminSmart di Bappeda dan Litbang mengurangi atau menghilangkan penggunaan kertas, mencetak, pengiriman fisik, dan pengarsipan dokumen, aplikasi digitalisasi perkantoran dapat membantu perangkat daerah mengurangi biaya operasional jangka panjang. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dapat mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang dihabiskan untuk pertemuan fisik.

Dengan adanya aplikasi administrasi perkantoran ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengelola administrasi perkantoran dengan cepat, dan mudah. Kedepanya aplikasi ini akan terus di optimalkan sesuai kebutuhan.

SI UPIK (SISTEM INFORMASI UNTUK PENGENDALIAN INFLASI KALTARA)

Inovator : Catur Hendratmo
Juara III Kategori Ide/Inisiatif

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan demikian berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengendalian inflasi memerlukan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi telah diperkuat dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) sejak tahun 2005 yang beranggotakan Bank Indonesia dan beberapa instansi pemerintah.

Sementara itu di tingkat daerah, koordinasi antara Bank Indonesia dengan unsur- unsur pemerintah daerah dilakukan dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mulai terbentuk tahun 2008 di sejumlah daerah.

Kalimantan Utara, sebagai propinsi ke 34 di Indonesia juga sudah membentuk TPID. Kalimantan Utara merupakan pulau terluar Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga hampir 90% kebutuhan bahan makanannya dipenuhi dari Pulau Jawa dan Sulawesi, untuk itu diperlukan koordinasi antar instansi dan badan untuk menjaga tekanan inflasi yang berasal dari pasokan bahan makanan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka untuk mengendalikan laju inflasi yang berfluktuatif, perlu dilakukan optimalisasi tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara melalui Si UPIK (Sistem Informasi Untuk Pengendalian Inflasi Kaltara).



Si UPIK dapat dikembangkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sistem ini memberikan gambaran tentang Inflasi bulanan Kaltara dan komoditas penyumbang inflasi dan stok dan kebutuhan komoditas strategis. Si UPIK diyakini mampu meningkatkan efektifitas kelembagaan TPID melalui penggunaan platform digital untuk mejaga inflasi Kaltara yang rendah dan stabil.

Ide utama dari program Si UPIK adalah meningkatkan efektifitas kelembagaan TPID melalui penggunaan platform digital untuk menjaga inflasi Kaltara yang rendah dan stabil. Karena selama ini, pengendalian inflasi masih bersifat *autopilot* atau dilakukan hanya jika ada laporan inflasi tinggi. Melalui program Si UPIK, pengendalian inflasi dapat terukur, bahkan menjadi *early warning system* (EWS) dalam menjaga inflasi yang rendah dan stabil.

Berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di instansi pemerintah *(e-Government)* sesuai dengan tugas, fung-



si, dan kewenangannya, serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Kebijakan tersebut diantaranya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional *e- Government* dan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Si UPIK merupakan bagian dari transformasi digital yang mengacu pada pengalihan sistem proses kerja dari secara manual ke sistem kerja yang berbasis elektronik (digital). Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.

Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan budaya berinovasi pada lingkup pemerintahan dan masyarakat sehingga meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan Kalimantan Utara Berubah, Maju, dan Sejahtera.

Tahapan kegiatan sebagaimana layaknya bentuk manajemen lainnya, manajemen kinerja yang baik juga harus diawali dengan perencanaan yang baik. Perencanaan kinerja merupakan bagian dari manajemen strategis yakni suatu proses yang sistematis untuk menentukan kondisi yang diharapkan terjadi pada masa depan.

Tahapan pembangunan sistem informasi yang akan dilaksanakan Si UPIK adalah :

- Pembentukan Tim
- Sosialisasi pentingnya Si Upik
- Merancang Bangun Sistem
- Menguji Sistem melalui Input data
- Mengevaluasi Keberlanjutan Sistem

Si UPIK dapat diadaptasi maupun direplikasi oleh daerah lain karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua daerah. Kesederhanaan dalam membuat Si UPIK (Sistem Informasi Untuk Pengendalian Inflasi Kaltara) akan memudahkan sistem ini untuk diadaptasi oleh daerah lain.

DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT (DMPG)

GAMBUT LESTARI, MASYARAKAT SEJAHTERA

Oleh GIZ



Salah satu upaya pemulihan ekosistem gambut berbasis kemandirian masyarakat ditingkat desa sekaligus dapat menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa seyogyanya memperhatikan tipologi desa yakni sesuai dengan karakteristik desa berdasarkan kondisi geografis, sosiologis, antropologis, dan ekologi sekitar desa. Pembangunan desa memerlukan kerangka kerja pembangunan yang berkelanjutan untuk menuju desa yang maju dan mandiri, melalui ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/lingkungan.

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) adalah ekosistem gambut yang berada diantara 2 sungai, antara sungai dan laut, dan/atau rawa (PP 71/2014 jo PP57/2016).

Ekosistem gambut di Kaltara tersebar di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau yang terdiri dari 13 (KHG) seluas 349.565 hektar. Dari luasan tersebut, terdapat 92% rusak ringan, 2% rusak sangat berat, 2% rusak berat, 2% rusak sedang dan 2% tidak rusak. 54% telah memiliki izin (perkebunan dan kehutanan) baik di dalam kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

Kondisi ekosistem gambut yang sudah mengalami degradasi tersebut utamanya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem gambut. Pembuatan drainase sebagai cara penyiapan lahan menyebabkan mengeringnya lahan gambut sehingga meningkatkan potensi bahaya kebakaran.

Dari 447 desa yang ada di Kalimantan Utara terdapat 56 desa yang berada di ekosistem gambut. Komitmen perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PPEG) Kaltara tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.279/2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kaltara untuk masa tahun 2024-2053 dan DMPG menjadi salah satu program yang tertuang dalam RPPEG tersebut.

Masyarakat desa memiliki peran kunci dalam implementasi PPEG ditingkat tapak dimana masyarakatlah yang memiliki hubungan fisik, sosial budaya dan ekonomi dengan gambut. Gambut lestari masyarakat sejahtera harus dapat diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata.

Munculnya Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan



Nomor P.6/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2023 tentang Program Mandiri Peduli Gambut (DMPG) menjadi kunci dalam mewujudkan gambut lestari masyarakat sejahtera.

DMPG adalah program pemulihan ekosistem gambut berbasis kemandirian masyarakat ditingkat desa yang pelaksanaanya melalui restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, revegetasi suksesi alami dan/atau revitalisasi mata pencaharian masyarakat.

GIZ bersama KLHK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menginisiasi program DMPG melalui projek *Peatland Management and Rehabilitation – PROPEAT.* Beberapa kegiatan telah dilakukan seperti ujicoba paludikultur, pendampingan perhutanan sosial di gambut dan alternatif mata pencaharian yang ramah gambut dan berbasis potensi lokal seperti pelatihan VCO, pelatihan pembuatan ikan asin gabus, dan pelatihan budidaya madu kelulud.



Paludikultur

Paludikultur adalah budidaya tanaman yang tahan dalam kondisi genangan atau basah, yang menghasilkan biomass yang cukup tanpa berdampak negatif bagi lahan gambut. Paludikultur dapat berupa pertanian, peternakan, perikanan, agroforestri, agrosilvofishery atau kegiatan-kegiatan yang mempertahankan gambut tetap basah atau tergenang serta mempertahan fungsi hidrologis gambut.

Pendekatan ini menjadi salah satu upaya mitigasi dampak lingkungan untuk mengurangi gas rumah kaca. Pemilihan jenis tanaman menjadi penting, agar produktifitas tanaman dan lingkungan dapat terjaga. Jenis lokal gambut yang memiliki nilai ekonomis sangat disarankan seperti gemor *(Nataphoebe coriacea)* dan kayu adat *(Cratoxylon arborescens).*

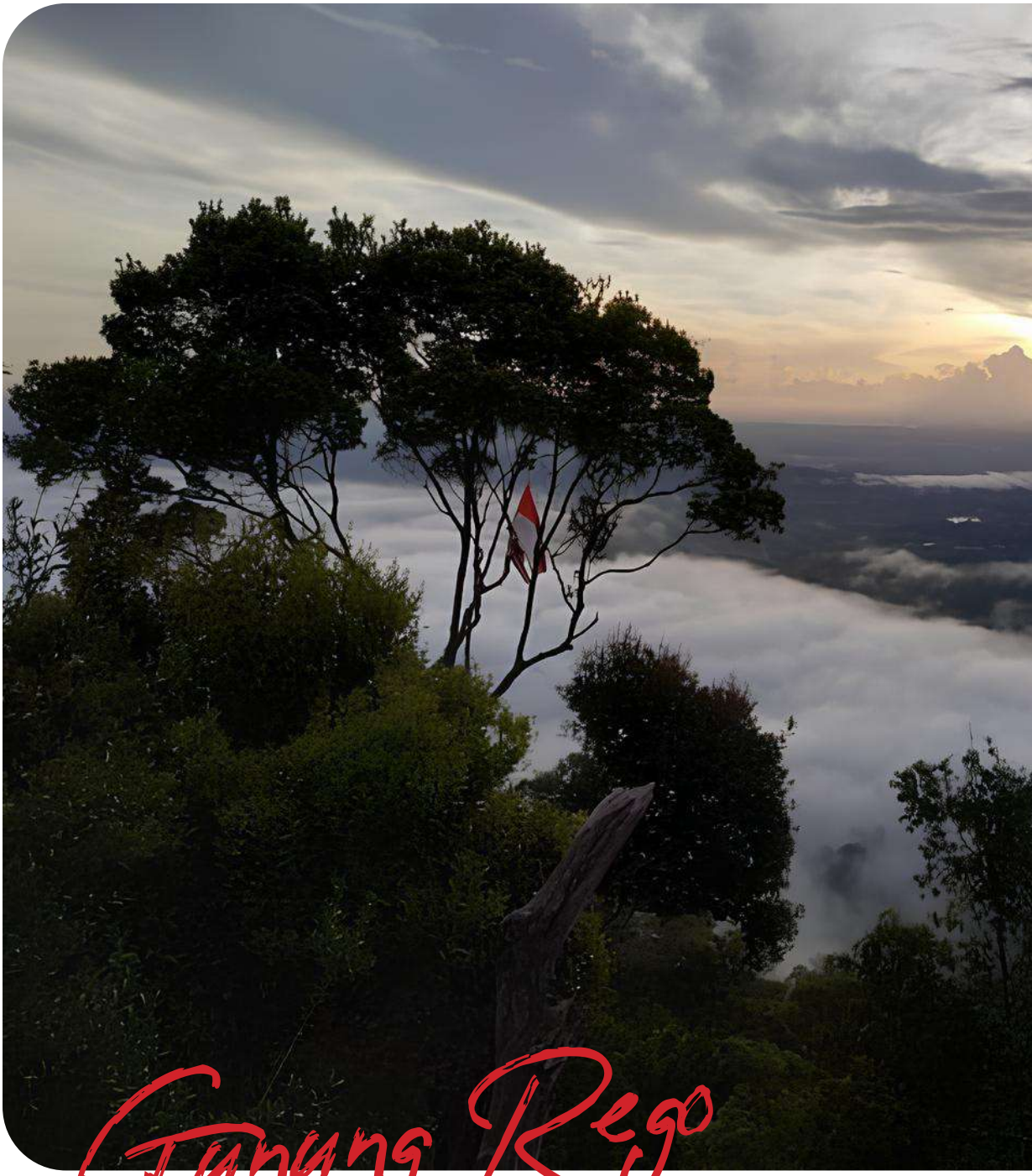


Pemanfaatan pertanian di lahan gambut hanya dapat dilakukan pada fungsi budidaya ekosistem gambut (< 3 m). Pemanfaatan disesuaikan dengan karakteristik gambut, yaitu a) gambut < 75 m untuk sawah, b) Gambut 75 – 150 m untuk hortikultura, padi gogo, palawija dan tanaman tahunan, c). Gambut hingga 2,5 m untuk perkebunan kelapa, kelapa sawit dan karet dan d(gambut > 2,5 m untuk tanaman kehutanan seperti gemor, kayu adat dan meranti.

Dari ujicoba paludikultur di Desa Atap dan Bebatu, tanaman yang memiliki pertumbuhan yang baik di gambut adalah nanas, labu kuning, kangkung, kacang panjang, keladi, terong, jagung dan padi jenis siam gaul dan siam anus. Pemilihan jenis tanaman yang tahan genangan dan bernilai ekonomi, akan meningkatkan produktifitas dan ekonomi masyarakat yang secara lebih luas akan meningkatkan ekonomi wilayah.

Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat yang ramah gambut menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Keberlanjutan pelaksanaan konsep tersebut membutuhkan dukungan dari para pihak baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. DMPG akan menjadi payung perencanaan dan implementasi kegiatan berbasis ekosistem dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem gambut. (GIZ)





Gunung Rego

Pesona Negeri di Atas Awan



(FOTO & TEKS) SAIFUL IMAM

Selamat datang di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dimana keindahan alam yang memukau menghadirkan Pesona Gunung Rego. Desa Pimping adalah gerbang menuju petualangan luar biasa ini, hanya 1,5 jam perjalanan dari pusat kota.

Pendakian dimulai dengan menjelajahi kebun sawit milik perusahaan setempat sebelum memasuki kawasan Gunung Rego.

Meskipun Gunung Rego memiliki ketinggian yang relatif rendah, yaitu sekitar 484 meter di atas permukaan laut, tantangan perjalanan dimulai sejak awal, dengan tingkat kemiringan mencapai 75 derajat, pendaki diuji dengan stamina maksimal.

Perjalanan menuju puncak Gunung Rego membutuhkan waktu sekitar 1-1,5 jam, tetapi rintangan tidak bisa dianggap enteng. Rute yang penuh akar dan licin memerlukan kewaspadaan ekstra, dan pendaki sering mengandalkan akar dan ranting pohon sebagai pegangan dan pijakan. Kerja sama tim menjadi kunci, dengan pendaki bekerja secara kompak dan saling menjaga. Meskipun terjal dan curam, pemandangan yang menakjubkan menanti di puncak.

Dari atas Gunung Rego, mata kita disuguhi panorama yang luar biasa, dengan negeri di atas awan yangmenginspirasi pengucapan Masya Allah dan Allahu Akbar. Keindahan alam yang mempesona ini adalah bukti ciptaan Tuhan semesta alam yang luar biasa.

Para pendaki tidak perlu khawatir tentang pasokan air, karena sekitar 10 menit dari puncak, terdapat sumber air gunung yang jernih dan asli, memberikan kesegaran di tengah perjalanan.

Semoga Gunung Rego terus mempesona dan tetap terjaga keindahannya. Mari kita selalu menjaga alam sebagaimana kita menjaga negeri tercinta kita, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Salam Lestari.

Potret Ruang





Photo : Irma Yupitasari

Desa Tanah Kuning adalah desa yang menjadi tujuan utama rekreasi akhir pekan bagi warga Kalimantan Utara yang ingin menikmati suasana pantai dan laut. Aktivitas masyarakat Desa Tanah Kuning berpusat di sepanjang pantai yang merupakan tepi dari Laut Sulawesi dan daratannya yang bertopografi landai dan berbukit





Photo : Ian Black

Seorang kakek dari suku Dayak di Desa Long Bang, sedang membuat Pabayo. Pabayo merupakan Penanda bahwa sedang ada acara besar bagi Masyarakat Dayak. Pabayo merupakan rumbai rautan kayu yang dibuat dengan cara meraut kayu menggunakan pisau raut.



(FOTO) BAPPEDA & LITBANG

INSPIRASI KARYA KERAJINAN HANDMADE DARI MALINAU

Potensi kerajinan rotan belum banyak yang menggarapnya. Padahal penghasilan dari mengelola salah satu potensi hasil hutan ini cukup besar, namun pengusaha rotan dapat dihitung dengan jari.

Indonesia merupakan penghasil 80 persen bahan baku rotan dunia, sehingga merupakan salah satu negara produsen rotan terbesar dunia, selain China dan Vietnam.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah penghasil rotan terbesar yang terkenal dengan kualitasnya. Rotan juga memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Rotan dikenal sebagai sumber terbarukan yang cepat tumbuh. Bahkan rotan hanya bisa tumbuh jika ada tanaman penopang lainnya (simbiosis komensalisme) sehingga berpengaruh besar dalam pelestarian ekosistem hutan. Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Malinau memiliki hasil rotan yang melimpah. Hal itulah yang membuat Abdul Haris, pemilik dari Galeri Ethnic Belanyat Wai mencari peluang untuk mendapatkan penghasilan. Rotan yang mudah di dapatkan disulap menjadi ragam aksesoris yang apik.

Usaha yang berawal dari hobi sang istri yang awalnya membuat tas rotan dan untuk dipakai sendiri, ternyata hasil kreasi secara otodidak tersebut disukai banyak orang sehingga banyak yang membeli tas tersebut. Sebelum menekuni usaha ini Ia menggeluti usaha di bidang percetakan. Namun karena omzet dari percetakan menurun, akhirnya Ia beralih dan fokus mengembangkan bisnis ini.

Akhirnya, sejak tahun 2015 sampai sekarang Galeri Belanyat Wai sudah banyak menghasilkan ribuan tas yang diproduksinya. Sebelumnya galeri ini bernama *Broken White*, hingga pada suatu ketika Ia mengubah menjadi Belanyat Wai yang memiliki arti tas/anjat rotan agar menonjolkan bahasa daerah dari Malinau.

Untuk ketersediaan bahan baku rotan dipasok dari Desa Long Sule dan Desa Long Pipa di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau.

Galeri ini juga berkomitmen untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bisa bekerja. Abdul Haris menceritakan bahwa dalam usahanya ini dia dibantu oleh empat orang pengrajin dan salah satu diantaranya adalah penyandang disabilitas.

Ketertarikan mempekerjakan pengrajin disabilitas dikarenakan oleh rasa peduli dengan nasib mereka. Perekrutan penyandang disabilitas, menurutnya menunjukkan bahwa Anda menghormati dan menghargai karyawan penyandang disabilitas dan memberi mereka kesempatan untuk bersinar serta meningkatkan semangat kerja mereka. Abdul Haris sempat diundang di pameran Karya Kreatif Indonesia 2017 dimana saat itu salah satu tas karyanya dibeli oleh istri Wakil Presiden RI Mufidah Jusuf Kalla dan istri Gubernur BI Nies Martowardojo.

Selain memproduksi tas rotan, lini bisnis Galeri Belanyat Wai juga memproduksi kain batik khas Malinau. Desain dari motif kain tersebut dibuat oleh beliau sendiri yang mana produksinya masih dilakukan di Pulau Jawa dikarenakan keterbatasan tenaga kerja jika diproduksi di rumah sendiri. Setiap desain yang dibuat memiliki ciri khas berupa keong. Hal ini bukan tanpa arti, ada filosofi dibalik penyematan gambar keong tersebut.

Ia menjelaskan bahwa keong meskipun lemah akan tetapi memiliki pelindung/cangkang yang melindungi tubuhnya.





Motif tersebut dinamakan batik Tea yang artinya bagus/indah. “Siapapun yang memakai batik tersebut harapannya menjadi indah dan bagus dipandang. Pesan moral dari motif ini adalah mari kita lestarikan alam disekitar kita,” tegasnya.

Beliau pun sangat mengapresiasi kebijakan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau yang sangat mendukung usaha kerajinan dan batik khas Kalimantan Utara dengan membuat peraturan penggunaan produk lokal Kaltara. Hal ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah dalam upaya mendukung UMKM lokal di Kalimantan Utara.(AS)





Galeri Belanyat Wai :
JL. Raja Pandita,
Kec. Malinau Kota.
MALINAU, KALIMANTAN UTARA

082150800153



INTERMEZZO WITH IDA AYU

Hai, Peradi!

Kembali saya Ida Ayu hadir di buletin ini untuk melanjutkan tulisan bagaimana berbicara seperti orang Kaltara. Setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang 'Ba', 'Kau', 'Meramput' dan 'Dorang, kali ini kita akan mengulik beberapa istilah lainnya yang sering digunakan oleh orang-orang di Kalimantan Utara.

Minta Puji

"Ih minta puji ba kau ni..."

Seperti bisa ditebak istilah 'minta puji' berasal dari kalimat 'minta dipuji' atau 'meminta pujian', sebuah kalimat yang ditujukan kepada orang yang suka mencari perhatian secara berlebihan atau di media sosial dikenal dengan istilah pansos atau melakukan sesuatu yang menarik perhatian orang biar viral.

Istilah 'minta puji' sama pengertiannya dengan 'cari perhatian' atau 'caper'. Orang yang minta puji biasanya tidak merugikan orang lain (melainkan terkadang merugikan dirinya sendiri hehehe). Kelakuan orang yang 'minta puji' yang konyol kerapkali jadi bahan candaan atau bahan gibah orang-orang disekitarnya.

Tumpis

Mulanya pengertian dari kata 'tumpis' adalah suka berbicara atau ceriwis. Tumpis adalah sebuah kata yang ditujukan bagi orang yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, *talkative* atau supel. Namun belakangan arti kata 'tumpis' berkembang menjadi sebuah kata yang memiliki pengertian yang *negative.*

Saat ini, kata 'tumpis' tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang suka ngomong tapi juga disematkan kepada orang-orang yang suka membicarakan hal yang sia-sia, banyak mulut dan tidak bisa dipercaya. Tak heran sesorang yang suka bergosip atau suka membocorkan rahasia dijuluki ember bocor alias tumpis.

'Jangan kau bicara kalau ada dia, tumpis betul mulutnya itu."

Paluy

Kata satu ini tergolong ke dalam kata umpatan. Mengumpat adalah salah satu kebiasaan buruk, karena ketika mengumpat biasanya orang mengucapkan kata-kata negatif yang bisa menyinggung perasaan orang lain.

Beberapa daerah memiliki kata-kata makian yang menjadi ciri khas daerah tersebut, sebut saja kata 'janc*k'. Meskipun memaki bukanlah hal yang patut dibanggakan, namun kamu mungkin pernah mendengar kata 'paluy' meluncur bebas secara sengaja ataupun tidak sengaja dari mulut orang sini saat sedang kesal atau marah. Sebenarnya ada juga kata-kata umpatan yang lain, tapi 'paluy' adalah yang paling popular, sampai ada tokoh fiksinya si Paluy.

Bagaimana, apakah kamu tertarik meng-upgrade kata makianmu? Misalnya mengganti kata 'goblok' yang terdengar kasar menjadi 'paluy' yang terdengar lebih halus meskipun artinya sama saja hehehe.

Kumpau Kering

Belum saya temukan padanan kata yang tepat untuk istilah satu ini. Baiklah saya terangkan artinya. Kata 'kumpau' atau 'kumpou' artinya sok bergaya, sok hebat, sok kaya, merasa superior atau lebih segalanya dari orang lain. Sedangkan kata 'kering' artinya ya kering, kosong, tidak berisi.

Kata 'kumpau' atau 'kumpou' ditujukan kepada orang yang sombong atau arogan. Contoh kalimat,"Malas aku sama bapak tu ba, kumpau betul. Macam dia aja yang paling hebat dalam dunia ni."

Pada kalimat di atas kemungkinan si Bapak memang hebat, memang pintar atau memang segalanya, hanya saja kesadarannya akan kualitas dirinya itu membuat sikapnya jadi menyebalkan karena cenderung meremehkan orang lain.

Adapun istilah 'kumpau kering' digunakan ketika orang yang merasa sok hebat tersebut adalah orang yang sebenarnya B aja, memiliki kemampuan rata-rata atau justru tidak punya kompetensi seperti yang berusaha dia tunjukkan. Misalnya orang yang sok kaya padahal dompetnya kembang kempis, sok pintar padahal otaknya kosong, sok hebat padahal tidak bisa diharapkan. Nah, orang seperti itulah yang disebut, "Kumpau kering!" *So, be humble* ajalah ya peradi.

Abutmu sa

Kalimat "Cuek aja lagi" atau "Emang gue pikirin" adalah terjemahan bebas yang sangat tepat untuk kalimat 'Abutmu sa'. Kata 'abut' secara harfiah berarti 'peduli', namun pada kalimat 'Abutmu sa' yang diucapkan secara acuh tak acuh sebagai respon terhadap penolakan orang lain atas sesuatu hal atau tindakan yang dilakukan justru memiliki makna ketidakpedulian. Kalimat "Abutmu sa" merupakan ungkapan sikap cuek dan keras kepala.

Contoh konkritnya, ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap suatu hal maka pendapat orang lain tidaklah penting baginya. Atau ketika dia mengambil suatu keputusan yang menurutnya harus dilakukan, maka meskipun mendapat penolakan dia akan tetap pada pendiriannya. Orang seperti itu sudah tidak perduli lagi, *unstopable*, nah pada saat itulah istilah ini berlaku, "Abutmu sa, maju terus pantang mundur."

Patah Pensil

Istilah satu ini ditujukan kepada orang yang memiliki wawasan yang sempit, pengetahuan terbatas atau minim adab. Intinya, ibarat pensil patah yang tidak bisa digunakan untuk menulis, orang yang dijuluki patah pensil tidak bisa diandalkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan intektual maupun emosional.

Berurusan dengan orang yang dijuluki 'patah pensil' bisa sangat merepotkan, apalagi jika sampai adu argumen. Beradu pendapat dengan seorang patah pensil bisa melebar kemana-mana, OOT alias *out of topic.* Misalnya dalam sebuah forum yang sedang dibahas adalah A, tapi yang dikomentarinya malah B. Bahkan, jika sedang apes berdebat dengan orang patah pensil bisa menyebalkan sekali. Karena ketika dia kalah dalam berargumentasi, maka dia akan menyerang kepribadian lawan bicaranya.

Oke Peradi, demikianlah beberapa istilah orang yang mungkin baru kamu dengar setelah berada di Kaltara. Semoga bisa menjawab keingintahuanmu terhadap makna dari istilah-istilah tersebut di atas dan semoga bisa menambah kosakata dalam pergaulan sehari-hari. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa!

BAPPEDA & LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kaltara Maju
Benuanta Sejahtera
25 OKTOBER 2024



Dirgahayu PROVINSI KALIMANTAN UTARA

25 Oktober 2024

Bertius, S.Hut
PLT. KEPALA BAPPEDA & LITBANG

Kaltara Maju
Benuanta Sejahtera

#bangga melayani bangsa

bappedalitbang_kaltara

https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id

Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Selamat Hari SUMPAH PEMUDA

-28 Oktober-

Beri aku 10 pemuda, niscaya
akan aku guncangkan dunia.
-Ir.Soekarno-



bappedalitbang_kaltara bappedadanlitbangprov_kalimantanutara bappeda&litbangprovkaltara bappedalitbang_kaltaraprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

DAPATKAN INFORMASI TERBARU SEPUTAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

FOLLOW US



bappedalitbang_kaltara | bappedadanlitbangprov_kalimantanutara | bappeda&litbangprovkaltara | bappedalitbang_kaltaraprov.go.id